

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALU

EKO SARYANTO



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALU

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**EKO SARYANTO
A31115715**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALU

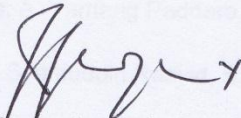
disusun dan diajukan oleh

EKO SARYANTO
A31115715

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

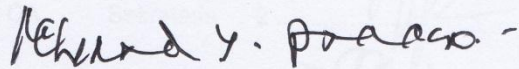
Makassar, 20 Januari 2017

Pembimbing I



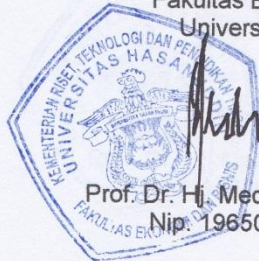
Drs. H. Harryanto, Pgd., Acc., M.Com., Ph.D
Nip. 19531210 198702 1 001

Pembimbing II



Drs. A. Yamang Paddere, Ak., M.Soc., Sc., CA
Nip. 19550913 198702 1 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA
Nip. 19650925 199002 2 001

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALU

disusun dan diajukan oleh


EKO SARYANTO
A31115715

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **27 Januari 2017** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. Harryanto, Pgd., Acc., M.Com., Ph.D	Ketua	1
2.	Drs. A. Yamang Paddere, Ak., M.Soc., Sc., CA	Sekretaris	2
3.	Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si	Anggota	3
4.	Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si., CA	Anggota	4

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19650925 199002 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

nama : Eko Saryanto

NIM : A31115715

departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALU

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 10 Januari 2017

Yang membuat pernyataan,



Eko Saryanto

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti menyadari bahwa segala daya dan upaya dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penelitian skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr. Gagaring Pagalung, S.E., M.S., Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., Ak., M.Si., CA selaku Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Drs. H. Harryanto, Pgd., Acc., M.Com., Ph.D selaku dosen pembimbing I dan Bapak Drs. A. Yamang Paddere, Ak., M.Soc., Sc., CA sebagai dosen pembimbing II atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti.
4. Ibu Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen penasehat akademik peneliti.
5. Bapak Dr. Syarifudin Rasyid, S.E., M.Si, dan Bapak Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si., CA, selaku tim penguji yang juga memberikan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala bantuannya.

7. Bapak Ir. H. Burhan Hamading, MH selaku Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu yang telah memberikan izin penelitian beserta seluruh pegawai yang telah memberikan dukungannya.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Beasiswa S1 STAR BPKP di Universitas Hasanuddin atas kebersamaannya selama mengikuti perkuliahan dan berbagai saran dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih khusus peneliti sampaikan kepada istri tercinta adinda Ernawati, S.Pd, orang tua dan saudara-saudara peneliti atas bantuan, nasehat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian skripsi ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-NYA atas bantuan yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan penelitian skripsi ini. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi sebagai referensi atau tambahan wawasan dalam bidang realisasi anggaran belanja bagi semua pihak.

Makassar, 10 Januari 2017

Peneliti

ABSTRAK

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Anggaran Belanja pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu

Analysis of Factors Affecting Budget Actual on Executive Agency Counseling and Food Security Palu

Eko Saryanto
Harryanto
A. Yamang Paddere

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor dokumen perencanaan dan kompetensi sumber daya manusia terhadap realisasi anggaran belanja pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan merupakan data primer. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* dengan 67 responden. Metode pengumpulan data yaitu survei dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program IBM SPSS 23.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) faktor dokumen perencanaan berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran belanja; (2) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran belanja. Selain itu penelitian ini juga menyimpulkan bahwa dokumen perencanaan dan kompetensi SDM berpengaruh secara simultan terhadap realisasi anggaran belanja.

Kata kunci: dokumen perencanaan, kompetensi SDM, realisasi anggaran belanja.

This study aims to determine the influence of the planning documents and the competencies human resources power to the realization of the budget at the Executive Agency Extension and Food Security Palu. This research is a descriptive research with quantitative approach. The data used is primary data. The sampling technique used was purposive sampling with 67 respondents. Methods of data collection that surveys using questionnaires distributed to respondents. Data were analyzed using multiple regression analysis with the help of IBM SPSS 23 program.

The results of this study concluded that: (1) the factor of planning documents positive impact on the realization of the budget; (2) the competence of human resources positive effect on the budget realization. In addition this study also concluded that the planning documents and competence of human resources simultaneously striving towards the realization of the budget.

Keywords: *planning documents, the competence of human resources, realization of the budget.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Kegunaan Teoretis	7
1.4.2 Kegunaan Praktis	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	9
2.1.1 Teori Perilaku Terencana (<i>Theory of Planned Behavior</i>)	9
2.1.2 Anggaran dan Penganggaran	11

2.1.3 Anggaran Sektor Publik	12
2.1.4 Fungsi Anggaran Sektor Publik	13
2.1.5 Mekanisme Penatausahaan Keuangan Daerah	16
2.1.6 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	20
2.1.7 Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Realisasi Anggaran	23
2.1.7.1 Dokumen Perencanaan	23
2.1.7.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia	25
2.2 Tinjauan Empirik	27
2.3 Kerangka Konseptual	29
2.4 Pengembangan Hipotesis	32
2.4.1 Faktor Dokumen Perencanaan terhadap Realisasi Anggaran Belanja	32
2.4.2 Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Realisasi Anggaran Belanja	33
 BAB III METODE PENELITIAN	 35
3.1 Rancangan Penelitian	35
3.2 Tempat dan Waktu	35
3.3 Populasi dan Sampel	36
3.3.1 Populasi	36
3.3.2 Sampel	36
3.4 Jenis dan Sumber Data	36
3.4.1 Jenis Data	36
3.4.2 Sumber Data	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data	38
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	39
3.6.1 Variabel Penelitian	39
3.6.2 Definisi Operasional	40

3.7 Instrumen Penelitian	42
3.7.1 Uji Validitas	43
3.7.2 Uji Reliabilitas	43
3.8 Analisis Data	44
3.8.1 Uji Normalitas	44
3.8.2 Analisis Regresi Linier Berganda	44
3.8.3 Koefisien Determinasi (R^2)	45
3.8.4 Uji F	45
3.8.5 Uji Statistik t	45
 BAB IV HASIL PENELITIAN	 46
4.1 Gambaran Umum Organisasi	46
4.1.1 Struktur Organisasi dan Tupoksi	47
4.2 Deskripsi Data	56
4.2.1 Karakteristik Responden	56
4.2.2 Demografi Responden	56
4.3 Analisis Data	58
4.3.1 Hasil Uji Kualitas Data	58
4.3.2 Uji Normalitas	62
4.3.3 Analisis Regresi Berganda	64
4.3.4 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	65
4.4 Pengujian Hipotesis	65
4.4.1 Hasil Uji F	65
4.4.2 Hasil Uji t	66
4.5 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis	68
4.5.1 Pengaruh Faktor Dokumen Perencanaan terhadap Realisasi Anggaran Belanja	 68
4.5.2 Pengaruh Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Realisasi Anggaran Belanja	 69

BAB V	PENUTUP	71
5.1	Kesimpulan	71
5.2	Keterbatasan Penelitian	71
5.3	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja	4
1.2 Realisasi Belanja Langsung Tahun 2012.....	5
1.3 Realisasi Belanja Langsung Tahun 2013.....	5
1.4 Realisasi Belanja Langsung Tahun 2014.....	5
1.5 Realisasi Belanja Modal Per Triwulan Tahun 2012 - 2014.....	6
2.1 Penelitian Terdahulu	27
4.1 Distribusi Kuesioner	56
4.2 Demografi Responden	57
4.3 Hasil Uji Validitas Variabel Faktor Dokumen Perencanaan	59
4.4 Hasil Uji Validitas Variabel Faktor Kompetensi SDM	60
4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Realisasi Anggaran Belanja.....	60
4.6 Hasil Uji Reliabilitas Masing-Masing Variabel	61
4.7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	64
4.8 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual.....	31
4.1 Struktur Organisasi	48
4.2 Grafik Histogram Uji Normalitas	62
4.3 Normal P-P Plot Uji Normalitas	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata	76
2. Angket Kuesioner.....	77
3. Skor Hasil Angket	82
4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Faktor Dokumen Perencanaan	85
5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Faktor Kompetensi SDM	87
6. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Realisasi Anggaran Belanja	89
7. Hasil Regresi Linear Berganda, Koefisien Determinasi (R^2), Uji F dan Uji t	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah atau sering juga disebut UU Otonomi Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, SKPD diberikan alokasi dana (anggaran) yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kepala SKPD disebut juga Pengguna Anggaran (PA). Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD), Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kepala SKPD dan pada akhirnya akan meminta kepada kepala SKPD yang bersangkutan untuk membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut bukanlah SPJ (surat pertanggungjawaban), tetapi berupa laporan keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menegaskan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang wajib dilaksanakan oleh setiap Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran serta Pengelola Bendahara Umum Negara/Daerah.

Laporan keuangan yang disusun oleh SKPD adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Laporan Atas Keuangan (CALK). Tujuan dari pelaporan keuangan ini adalah menyediakan informasi mengenai bagaimana SKPD mendapatkan dana (anggaran) untuk melaksanakan program kerja yang telah disusun.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu instansi pemerintahan, dimana fungsinya untuk mengetahui keadaan keuangan suatu instansi pemerintahan. Laporan realisasi anggaran adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi, yaitu aktivitas pengumpulan dan pengelolaan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan atau ikhtisar-ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam membuat atau mengambil keputusan.

Dalam proses akuntansi yang dilaksanakan SKPD agar bisa menghasilkan laporan realisasi anggaran, dimulai dari proses ketersediaan SPD (Surat Penyediaan Dana) yang diterbitkan oleh DPPKAD selaku BUD. Selanjutnya SKPD mengajukan SPJ, SPP, dan SPM. Mekanisme tersebut dimulai dari pengajuan SPJ oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) kepada bendahara pengeluaran. Kemudian bendahara pengeluaran membuat SPP dan SPM, dimana SPP ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan SPM ditandatangani oleh pengguna anggaran. Setelah lengkap berkas tersebut kemudian diverifikasi oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan). Selesai diverifikasi kemudian diajukan ke BUD (Bendahara Umum Daerah) untuk menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Apabila pengurusan berkas administrasi tersebut berjalan dengan lancar, maka program kegiatan yang telah direncanakan oleh SKPD akan segera terealisasi.

Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga memperlihatkan berbagai unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Dalam menyusun LRA, sebagaimana diatur dalam PSAP Nomor 02, klasifikasi yang dicantumkan pada lembar muka laporan keuangan adalah menurut jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Selanjutnya, kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan kinerja SKPD dalam melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja laporan realisasi anggaran dimulai dari masukan (input) yang berupa jumlah anggaran belanja dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program kegiatan yang telah direncanakan hal ini merupakan proses. Hasil dari proses tersebut merupakan keluaran (output) dalam bentuk analisis anggaran belanja yang dibandingkan dengan realisasi belanja. Dari analisis laporan tersebut digunakan untuk menilai bagaimana dampak (outcome) dari program yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Laporan realisasi anggaran merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program.

Selanjutnya untuk melihat perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja dalam laporan realisasi anggaran belanja pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu dari tahun 2012 -2014 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu
Tahun 2012 -2014

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)	Realisasi Belanja Langsung (Rp)	SILPA (Rp)	Persen- tase Realisasi (%)
1.	2012	5.711.929.756	3.912.129.775	1.526.403.993	273.395.988	95,21
2.	2013	7.761.630.552	4.048.439.035	3.476.172.902	237.018.615	96,95
3.	2014	8.428.893.268	4.237.183.498	4.087.620.260	104.089.510	98,77
Rata-rata Persentase Realisasi						96,97

Sumber : LRA BP2KP Kota Palu Tahun 2012-2014

Laporan realisasi anggaran tahun 2012-2014 SKPD Badan Penyuluhan dan Pelaksana Ketahanan Pangan Kota Palu selalu menunjukkan persentase di atas 90%. Angka tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini berarti hampir seluruh program kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana. Selanjutnya untuk melihat secara lebih detail akan disajikan realisasi belanja langsung dari tahun 2012 sampai dengan 2014.

Berikut data realisasi belanja langsung dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

Tabel 1.2
Realisasi Belanja Langsung Tahun 2012
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu

Realisasi Belanja Langsung Tahun 2012			
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Belanja Pegawai	274.200.000	269.400.000	98,25
Belanja Barang dan Jasa	945.283.400	857.844.793	90,75
Belanja Modal	399.714.200	399.159.200	99,86
Total	1.619.197.600	1.526.403.993	96,29

Sumber : LRA BP2KP Kota Palu Tahun 2012

Tabel 1.3
Realisasi Belanja langsung Tahun 2013
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu

Realisasi Belanja Langsung Tahun 2013			
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Belanja Pegawai	491.575.000	490.400.000	99,76
Belanja Barang dan Jasa	1.900.826.650	1.837.578.906	96,67
Belanja Modal	1.153.598.350	1.148.193.996	99,53
Total	3.546.000.000	3.476.172.902	98,66

Sumber : LRA BP2KP Kota Palu Tahun 2013

Tabel 1.4
Realisasi Belanja langsung Tahun 2014
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu

Realisasi Belanja Langsung Tahun 2014			
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Belanja Pegawai	651.592.000	651.592.000	100
Belanja Barang dan Jasa	2.354.221.055	2.317.890.760	98,46
Belanja Modal	1.162.186.945	1.118.137.500	96,21
Total	4.168.000.000	4.087.620.260	98,22

Sumber : LRA BP2KP Kota Palu Tahun 2014

Dari data realisasi belanja langsung diatas, dapat diuraikan dalam bentuk anggaran dan realisasi belanja modal per triwulan dari tahun 2012 hingga tahun 2014 sebagai berikut.

Tabel 1.5
Realisasi Belanja Modal Per Triwulan
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja Modal TW 1 (Rp)	Realisasi Belanja Modal TW 2 (Rp)	Realisasi Belanja Modal TW 3 (Rp)	Realisasi Belanja Modal TW 4 (Rp)
2012	399.714.200	-	34.900.000	133.602.700	203.656.500
2013	1.153.598.350	1.500.000	87.406.500	333.500.000	725.787.496
2014	1.162.186.945	6.200.000	24.600.000	129.537..500	957.800.000

Sumber : LRA BP2KP Kota Palu Tahun 2012 -2014

Dari tabel diatas terlihat bahwa pelaksanaan anggaran belanja langsung khususnya belanja modal pada BP2KP kota Palu di triwulan I sampai dengan triwulan III memperlihatkan rendahnya penyerapan realisasi belanja dan cenderung menumpuk di akhir triwulan IV atau akhir tahun anggaran. Akibatnya anggaran yang sudah tersedia di awal tahun dan merupakan hak masyarakat dalam bentuk pelayanan publik, terpaksa tidak bisa dilaksanakan karena SKPD cenderung membelanjakannya di akhir tahun. Padahal apabila realisasi belanja dilaksanakan di awal tahun, maka pertumbuhan ekonomi telah terjadi di awal tahun dan akan berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang menyentuh langsung kepada masyarakat dalam hal penciptaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan pangan, pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan inilah yang ingin diteliti, sehingga tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul : "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Anggaran Belanja pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1.2.1 Apakah faktor dokumen perencanaan berpengaruh terhadap realisasi anggaran belanja?
- 1.2.2 Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap realisasi anggaran belanja?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

- 1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh faktor dokumen perencanaan terhadap realisasi anggaran belanja.
- 1.3.2 Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap realisasi anggaran belanja.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam hal pengembangan wawasan dibidang anggaran pemerintah daerah dan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik serta dapat dijadikan referensi atau bukti tambahan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang topik yang sama.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Sebagai bahan informasi dan bahan referensi untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait realisasi penyerapan anggaran belanja agar dapat terserap secara proporsional. Khususnya pada SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan masalah dalam melakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran belanja langsung khususnya belanja modal yang rendah pada triwulan I sampai triwulan III dan cenderung dipaksakan diakhir triwulan IV atau akhir tahun anggaran yang terjadi di SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu melalui pengisian kuesioner.

Peneliti memfokuskan analisis faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran belanja pada faktor dokumen perencanaan program kegiatan dan faktor kompetensi sumber daya manusia yang difokuskan pada pegawai penatausahaan keuangan dan pelaksana kegiatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori perilaku terencana atau TPB (*Theory of Planned Behavior*) merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori perilaku beralasan (*Theory of Reasoned Action*). TPB merupakan kerangka berpikir konseptual yang bertujuan untuk menjelaskan determinan perilaku tertentu. Faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat individu (*behavior intention*) terhadap perilaku tertentu tersebut. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu (1) sikap (*attitude*) terhadap perilaku dimana individu menilai atas sesuatu yang menguntungkan dan tidak menguntungkan, (2) norma subjektif (*subjective norm*) merupakan tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, dan (3) persepsi kontrol berperilaku (*perceived behavior control*) yang berpedoman pada persepsi kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku dan diasumsikan untuk mencerminkan pengalaman masa lalu sebagai antisipasi hambatan dan rintangan.

Fishbein dan Ajzen dalam Aloysia dan Yuliana (2004:135) berpendapat,

Planned behavior theory didasarkan atas pendekatan terhadap *beliefs* yang dapat mendorong individu untuk melakukan perilaku tertentu. Pendekatan terhadap *beliefs* dilakukan dengan mengasosiasikan berbagai karakteristik, kualitas, dan atribut berdasarkan informasi yang telah dimiliki, kemudian secara otomatis akan terbentuk intensi untuk berperilaku. Pendekatan dalam *planned behavior theory* dikhususkan pada perilaku spesifik yang dilakukan individu dan dapat digunakan untuk semua perilaku secara umum

Keyakinan yang menonjol ini dapat dibedakan menjadi tiga yaitu pertama, *behavior belief* yaitu keyakinan individu akan hasil suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. *Behavior belief* akan mempengaruhi sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*). Kedua adalah *normative belief* yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya seperti keluarga, teman, atasan, dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku. Ketiga adalah *control belief* yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya. *Control belief* membentuk variabel persepsi kontrol berperilaku (*perceived behavior control*). Dalam TPB sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol berperilaku ditentukan melalui keyakinan-keyakinan utama. Determinan suatu perilaku merupakan hasil dari penilaian keyakinan-keyakinan dari individu, baik secara positif maupun negatif. Teori perilaku terencana atau TPB (*Theory of Planned Behavior*) didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasi-informasi yang mungkin baginya secara sistematis. Orang memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku-perilaku tertentu.

TPB dapat mendorong seseorang yang bekerja pada instansi pemerintah untuk membuat perencanaan program kegiatan dengan baik (sikap) dan berusaha agar setiap program kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran dan tepat waktu (norma subjektif). Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (persepsi kontrol berperilaku). Pelaksanaan program kegiatan tersebut didanai dari APBD dan tercermin dalam laporan realisasi anggaran.

2.1.2. Anggaran dan Penganggaran

Pengertian anggaran menurut para ahli adalah sebagai berikut.

- a. Menurut Mardiasmo (2009:61) "Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial".

- b. Menurut Harryanto (2008:3)

Anggaran dalam arti luas meliputi jangka waktu anggaran direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan. Anggaran dalam arti sempit meliputi rencana penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun saja.

- c. Menurut Munandar (2001:3)

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku dalam jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.

- d. Nafarin (2007:11) menyatakan bahwa "Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan." Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu.

Perencanaan dalam anggaran biasanya mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dengan suatu pendekatan formal dan sistematis dari pelaksanaan tanggung jawab manajemen. Pendekatan formal dan sistematis yang dimaksud disini adalah penganggaran.

Menurut Harryanto (2008:3), “penganggaran (*budgeting*) merupakan aktivitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja organisasi yang cenderung tidak terbatas”. Mardiasmo (2009:61) berpendapat, “penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran”. Sedangkan menurut Supriyono (1999:15), “penganggaran merupakan perencanaan keuangan perusahaan yang dipakai sebagai dasar pengendalian (pengawasan) keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang”. Jadi dapat disimpulkan bahwa penganggaran merupakan proses mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas sebagai dasar pengendalian (pengawasan) keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang.

2.1.3. Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Mardiasmo (2009:62) menyatakan,

Anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang.

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010:44) “Anggaran dalam organisasi sektor publik tidak hanya sebagai rencana tahunan, tetapi juga alat akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya”.

Sedangkan menurut Syamsi (1994:72),

Anggaran negara adalah hasil dari suatu perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam - macam kegiatan terpadu, baik menyangkut penerimaannya maupun pengeluarannya yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu.

Dengan demikian anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan mengenai bermacam - macam kegiatan terpadu, baik menyangkut penerimaannya maupun pengeluarannya yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu.

2.1.4. Fungsi Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2009:63),

Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu sebagai (1) alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilaian kinerja, (7) alat motivasi, dan (8) alat menciptakan ruang publik.

Anggaran merupakan alat perencanaan (*planning tool*) manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

Anggaran sebagai alat pengendali (*control tool*) memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. Sebagai alat pengendali manajerial anggaran digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, anggaran digunakan untuk memberi informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien dan efektif.

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*fiscal tool*) pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Anggaran sebagai alat politik (*political tool*) digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesempatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih merupakan alat politik. Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan *political skill*, *coalition building*, keahlian bernegosiasi dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. Manajer publik harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menjatuhkan kepemimpinannya, atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah.

Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*coordination and communication tool*) dimana setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkup eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (*performance measurement tool*) merupakan wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Anggaran sebagai alat motivasi (*motivation tool*) digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but achievable*. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (*public sphere*) dimana anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan coba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka. Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisasi akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada. Pengangguran, tunawisma, dan kelompok lain yang tak terorganisasi akan dengan mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan pemerintah. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan suara mereka, maka mereka akan mengambil tindakan dengan jalan lain seperti dengan tindakan massa, melakukan boikot, vandalisme, dan sebagainya.

2.1.5. Mekanisme Penatausahaan Keuangan Daerah

Dalam melaksanakan mekanisme penatausahaan keuangan daerah khususnya SKPD yang menangani pengeluaran kas yakni bagaimana proses analisa, penggolongan atau pengelompokan, pengihktisaran dan pelaporan transaksi keuangan dalam rangka untuk pertanggungjawaban pengelolaan APBD yang dibebankan pada DPA SKPD dengan pengeluaran kas pada SKPD yang dilaksanakan baik secara manual maupun dengan sistem yang sudah terkomputerisasi.

Mekanisme penatausahaan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh SKPD adalah sebagai berikut.

1. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)

SPD merupakan Surat Penyediaan dana yang dibuat oleh BUD atas dasar anggaran kas yang telah diajukan oleh SKPD, agar dalam penatausahaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik. Dalam penatausahaan keuangan tersebut BUD harus mampu memperhitungkan jumlah penyediaan dana kas bagi setiap SKPD karena hal tersebut akan mengurangi jumlah dana yang dapat disediakan dalam satu kali pengajuan SPD serta periode pengajuan SPD. Penerbitan SPD dapat dilakukan pada awal tahun untuk belanja tidak langsung dan pada awal triwulan untuk belanja langsung.

2. Pembuatan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Setelah diterbitkannya SPD oleh PPKD, maka berdasarkan SPD tersebut atau dokumen yang dipersamakan dengan SPD, selanjutnya bendahara pengeluaran membuat dan mengajukan surat pengantar SPP yang ditujukan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

melalui PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) SKPD. SPP yang diajukan harus sesuai dengan SPD sebagai dasar berapa jumlah yang akan diminta untuk dibayarkan kepada SKPD.

Dalam hal ini, SPP terbagi dalam 4 jenis yaitu sebagai berikut.

a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP)

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka untuk pengisian uang persediaan. Pengajuan SPP-UP ini hanya dilakukan sekali dalam setahun biasanya diajukan pada awal tahun anggaran setelah terbit SPD belanja langsung.

b. SPP Ganti Uang (SPP-GU)

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka sebagai ganti uang persediaan. SPP-GU digunakan untuk melakukan penggantian uang persediaan yang sudah terpakai. Pengajuan SPP-GU ini diajukan ketika uang persediaan habis berdasarkan SPD belanja langsung yang terbit per triwulan.

c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU)

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka sebagai tambahan uang persediaan. SPP-TU dipergunakan ketika SKPD meminta tambahan uang yang disebabkan apabila terjadi beberapa program kegiatan yang memerlukan jumlah anggaran yang besar sehingga saldo uang persediaan tidak cukup untuk membiayainya.

Biasanya pembuatan SPP-TU ini harus berdasarkan pada perencanaan perkiraan pengeluaran SKPD yang tepat. Pengajuan dana tambahan uang harus berdasarkan pada program dan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan belanja langsung.

Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. Jumlah dana tambahan uang yang diminta dalam SPP-TU harus dipertanggungjawabkan tersendiri dan apabila dana tambahan uang tersebut tidak habis digunakan oleh SKPD, maka sisa dari tambahan uang persediaan harus dikembalikan dan disetorkan ke kas umum daerah.

d. SPP Langsung (SPP-LS)

Merupakan SPP yang dipergunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh SKPD. Dalam hal ini, SPP-LS dapat digolongkan sebagai berikut.

1) SPP-LS gaji dan tunjangan

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

2) SPP-LS barang dan jasa

Dalam penerbitan SPP-LS barang dan jasa, PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran barang dan jasa.

3. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

Dalam penerbitan SPM merupakan bagian yang penting dalam proses penatausahaan keuangan hal tersebut dapat dilakukan ketika dokumen SPP yang diajukan dinyatakan lengkap dan sah oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SPM. Penerbitan SPM paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPM. Apabila dokumen SPP yang diajukan tidak lengkap atau tidak sah, maka pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat menolak menerbitkan SPM. Penolakan penerbitan SPM paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP.

Proses ini dilakukan mulai dengan pengujian atas SPM yang diajukan baik dari segi kelengkapan dokumen ataupun kebenaran pengisiannya. Untuk SPM GU dan TU, pengujian juga dilakukan atas SPJ yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. Secara legal, penerbitan SPM adalah otorisasi dari pejabat pengguna anggaran, dimana tanda tangan dokumen SPM dilakukan oleh pengguna anggaran. Selanjutnya SPM yang telah ditandatangani diajukan kepada bendahara umum daerah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencairan dana dengan menerbitkan SP2D.

4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Surat perintah pencairan dana adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD. SP2D ini bersifat spesifik, artinya satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM saja.

SP2D dapat diterbitkan jika.

- a. Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia.
- b. Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk waktu pelaksanaan penerbitan SP2D yaitu.

- a. Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPM diterima
- b. Apabila ditolak, dikembalikan 1 hari sejak diterima SPM.

5. Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran

Dalam pertanggungjawaban keuangan SKPD, bendahara pengeluaran secara administratif mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran mencakup.

- a. Buku kas umum pengeluaran
- b. Ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukti pengeluaran yang sah
- c. Bukti penyetoran pajak PPN/PPh ke kas negara
- d. Register penutupan kas.

2.1.6. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menurut Bastian, (2007:387), "laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan di awal periode dengan jumlah yang telah direalisasi di akhir periode". Sedangkan menurut Mahsun, (2006:128), "laporan realisasi anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan laporan realisasi anggaran adalah laporan yang disusun untuk memberikan informasi tentang realisasi

pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang secara tersanding. Penyingkapan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk pemerintahan daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri 13 Tahun 2006, belanja diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Selanjutnya, kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari.

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dalam kelompok belanja langsung tersebut dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja jenis ini antara lain belanja honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur. Termasuk honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan.

2. Belanja Barang Dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai habis, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak/penggandaan, belanja sewa tempat, belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir, belanja sewa alat berat, belanja sewa belanja perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makan minum, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja perjalanan dinas, belanja kursus pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja pemeliharaan, dan belanja jasa narasumber/tenaga ahli.

3. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk belanja modal pengadaan alat-alat angkut darat bermotor, belanja alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, belanja pengadaan peralatan kantor, belanja perlengkapan kantor, belanja pengadaan komputer, belanja pengadaan mebel, belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon, belanja modal pengadaan buku dan belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

2.1.7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Realisasi Anggaran

2.1.7.1. Dokumen Perencanaan

Dasar hukum dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran daerah mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut.

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengertian dokumen menurut Sukoco (2007:134) adalah “informasi yang dikumpulkan dan bisa diakses serta digunakan”. Dokumen merupakan kumpulan data yang berbentuk nyata dan diperoleh berdasarkan sistem pengelolaan data.

Pengertian perencanaan menurut Usman (2011:60) adalah “proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.” Sedangkan menurut Soekidjo (2003:36) “perencanaan adalah suatu kegiatan atau proses penganalisisan dan pemahaman sistem, penyusunan konsep dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan demi masa depan yang baik. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dokumen perencanaan merupakan kumpulan data yang berisi tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan selama periode waktu tertentu.

Dokumen perencanaan anggaran memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran. Alokasi anggaran pendapatan disebut estimasi pendapatan yang dialokasikan dan alokasi anggaran belanja disebut

allotment. Dokumen pelaksanaan anggaran di pemerintah pusat disebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sedangkan di pemerintah daerah disebut Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).

Dengan diterbitkannya peraturan daerah tentang APBD, SKPD wajib menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dengan demikian maka fleksibilitas penggunaan anggaran diberikan kepada Pengguna Anggaran. DPA disusun secara rinci sampai dengan organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja disertai indikator kinerja. Dokumen ini disertai dengan rencana penarikan dana untuk mendanai kegiatan dan apabila dari kegiatan tersebut menghasilkan pendapatan maka rencana penerimaan kas juga dilampirkan.

Kegiatan perencanaan dan penganggaran yang melibatkan seluruh unsur pelaksana yang ada di SKPD, mulai dari penentuan program dan kegiatan, klasifikasi belanja, penentuan standar biaya, penentuan indikator kinerja dan target kinerja, sampai dengan jumlah anggaran yang harus disediakan, memerlukan perhatian yang serius bagi pimpinan satuan kerja perangkat daerah beserta pelaksana program dan kegiatan.

Dokumen anggaran juga harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Mardiasmo (2009:69) mengemukakan,

Banyak faktor yang mempengaruhi dalam proses perencanaan anggaran antara lain; (1) Tujuan dan target yang hendak dicapai, (2) Ketersediaan sumber daya (faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah), (3) Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target, (4) faktor-faktor lainnya seperti munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam, kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi anggaran.

2.1.7.2. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Widodo (2011:35) menjelaskan “kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai”. Wiley dalam Azhar (2007:11) menyatakan “sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut”.

Becker and Ulrich dalam Suparno (2005:24) menyatakan bahwa *competency refers to an individual's knowledge, skill, ability or personality characteristics that directly influence job performance*. Artinya, kompetensi mengandung aspek-aspek pengetahuan, keterampilan (keahlian) dan kemampuan ataupun karakteristik kepribadian yang mempengaruhi kinerja.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2004, tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menjelaskan tentang sertifikasi kompetensi kerja sebagai suatu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan atau Internasional

Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor: 46A tahun 2003, tentang pengertian kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah membawa perubahan besar dan memberikan pendekatan baru dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Perubahan tersebut merupakan suatu perubahan yang bersifat paradigmatik, sementara perubahan yang lebih bersifat pragmatik, yaitu terkait dengan penatausahaan keuangan daerah. Perubahan itu sudah sampai pada teknik akuntansinya yang meliputi perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi untuk tujuan sistem pengendalian intern, laporan, serta pengawasan. Perubahan tersebut membutuhkan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.

Menurut Tjiptoherijanto (2001:52), “untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumberdaya tersebut”. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Sejalan dengan berbagai pendapat yang dikemukakan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten terutama dalam bidang keuangan. Kompetensi sumber daya manusia dapat dilihat berdasarkan kualifikasi pendidikan yang sesuai, sertifikat pelatihan melalui ujian sertifikasi, deskripsi jabatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

2.2. Tinjauan Empirik

Beberapa penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran antara lain.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Judul dan Peneliti	Metode Penelitian	Analisis Data	Hasil Penelitian
1. Analisis Keterlambatan penyerapan anggaran belanja satuan kerja kementerian negara/lembaga TA 2010 di wilayah pembayaran KPPN Pekan baru. Retno Miliasih (2012)	Analisis Kuantitatif Deskriptif	<i>Cross Tabulation</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan penyerapan anggaran belanja disebabkan oleh dua faktor yaitu: (1) kebijakan teknis, dan (2) kultur pengelolaan anggaran di satuan kerja.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja kementerian /lembaga di wilayah Jakarta Hendris Herriyanto (2012)	Penelitian Eksploratori	a. Uji Validitas Instrumen b. Uji Reliabilitas Instrumen c. Uji Korelasi antar Variabel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan penyerapan anggaran belanja disebabkan oleh lima faktor yaitu: (1) faktor perencanaan, (2) faktor administrasi, (3) faktor sumber daya manusia, (4) faktor dokumen pengadaan, dan (5) faktor ganti uang persediaan.

Lanjutan tabel 2.1

Judul dan Peneliti	Metode Penelitian	Analisis Data	Hasil Penelitian
<p>3. Faktor-faktor penyebab terjadinya penumpukan realisasi anggaran belanja di akhir tahun anggaran pada satuan kerja di wilayah KPPN Kediri.</p> <p>Iwan Dwi Kuswoyo (2011)</p>	Kuantitatif Deskriptif	Analisis Faktor Eksploratif (<i>Exploratory Factor Analysis-EFA</i>)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama penumpukan realisasi anggaran belanja di akhir tahun anggaran disebabkan oleh empat faktor utama yaitu : (1) faktor perencanaan, (2) faktor pelaksanaan anggaran, (3) faktor pengadaan barang/jasa, dan (4) faktor internal satker.
<p>4. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah di pemerintah provinsi Bengkulu</p> <p>Carlin Tasya Putri (2014)</p>	Kuantitatif Deskriptif	<p>a. Uji Normalitas</p> <p>b. Uji Multikolonieritas</p> <p>c. Uji Heteroskedastisitas</p> <p>d. Uji Regresi Linear berganda</p> <p>e. Uji Statistik t</p> <p>f. Uji Statistik F</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu: kompetensi sumber daya manusia, dokumen pengadaan, uang persediaan, dokumen perencanaan, dan pencatatan administrasi

2.3. Kerangka Konseptual

Menurut teori kontijensi menyatakan bahwa tidak ada rancangan dan penggunaan sistem pengendalian manajemen yang dapat diterapkan secara efektif untuk semua kondisi organisasi, namun sebuah sistem pengendalian tertentu hanya efektif untuk situasi atau organisasi atau perusahaan tertentu. “Kesesuaian antara sistem pengendalian manajemen dan variabel konstektual organisasi dihipotesiskan untuk menyimpulkan peningkatan kinerja organisasi dan individu yang terlibat didalamnya” (Otley 1980; Fisher 1998 dalam Adrianto, 2008:27).

Dalam kerangka konseptual penelitian ini, pendekatan kontijensi mengungkapkan bahwa perencanaan dan penggunaan desain sistem pengendalian manajemen tergantung pada karakteristik organisasi dan kondisi lingkungan di mana sistem tersebut ditetapkan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori kontijensi yaitu dokumen perencanaan yang erat kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran belanja.

Mempersiapkan dokumen perencanaan anggaran yang lengkap dan memadai akan mempengaruhi realisasi anggaran belanja. Sehingga tidak ada anggaran belanja yang harus direvisi. Pengajuan penyusunan anggaran yang tidak disertai dokumen pendukung yang memadai menyebabkan anggaran yang diajukan diberi tanda bintang. Hal ini mengakibatkan revisi dan penghilangan anggaran bertanda bintang tersebut memerlukan proses yang memakan waktu. Lebih parah lagi apabila revisi anggaran dilakukan beberapa kali, sehingga berakibat proses penyerapan belanja yang terhambat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hendris Herryanto (2012:60) bahwa anggaran kegiatan yang diblokir, terlambatnya pengesahan dokumen pengumuman lelang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Jakarta.

Jika dalam teori Stewardship hal itu digambarkan seperti hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*steward*). Teori ini memiliki asumsi bahwa kepentingan personal antara manajer dan pemegang saham dapat diselaraskan melalui pencapaian tujuan organisasi. Begitu juga hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan realisasi anggaran dapat diselaraskan melalui tujuan organisasi yang hendak dicapai. Sumber daya manusia yang kompeten diharapkan dapat bekerja secara profesional untuk merealisasikan anggaran secara proporsional. Sehingga program kegiatan yang tertera dalam dokumen perencanaan dapat terlaksana sesuai jadwal. Terlaksananya program kegiatan sesuai jadwal dapat meminimalisir penumpukan anggaran pada akhir tahun. Sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana kompetensi sumber daya manusia sebagai *steward* yang termotivasi pada *principal* (realisasi anggaran belanja).

Pada teori stewardship didasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku yang dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani. Pada teori stewardship terdapat suatu pilihan antara perilaku *self serving* dan *pro organisational*, perilaku tersebut tidak akan dipisahkan dari kepentingan organisasi. .

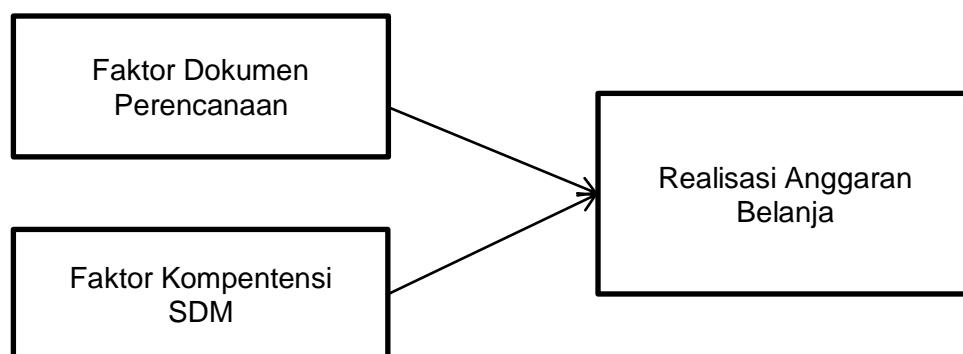
Mengacu pada teori stewardship diatas, pada penelitian ini menekankan pada kompetensi sumber daya manusia yang erat kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran belanja. Menurut Mangkunegara (2012:40) "kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya". Perubahan besar dalam pengelolaan keuangan pemerintah membutuhkan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.

Kompetensi sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kinerja. Seseorang yang tidak memiliki kompetensi, akan berpengaruh terhadap kinerja yang buruk. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Hendris Herriyanto (2012:61), “Sumber daya manusia pelaksana yang kurang kompeten, rangkap tugas dalam jabatan panitia pengadaan dan tidak memiliki sertifikat pelatihan berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran”

Agar keterlambatan penyerapan anggaran dapat dihindari diharapkan sumber daya manusia dalam hal ini pegawai SKPD memiliki kemauan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan ujian sertifikasi sehingga pegawai SKPD tersebut memiliki kompetensi yang memadai. Kemauan dan keinginan untuk mengikuti ujian sertifikasi dalam TPB merupakan unsur norma subjektif dimana keyakinan individu terhadap harapan normatif ini nantinya akan menjadi rujukan, teman, atasan, dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut.

Berdasarkan kajian teoritis sebagaimana telah dipaparkan diatas, maka dalam penyusunan penelitian ini penulis mengajukan kerangka konseptual sebagai berikut.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



2.4. Pengembangan Hipotesis

Menurut Djarwanto PS dan Pangestu Subagyo (1994:183) “hipotesis adalah pernyataan mengenai sesuatu hal yang harus diuji kebenarannya, untuk bisa membuktikan benar atau tidaknya pernyataan ini diperlukan penelitian dan analisis”.

2.4.1. Faktor Dokumen Perencanaan terhadap Realisasi Anggaran Belanja

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Terdapat hubungan yang erat antara anggaran, perencanaan dan pengendalian, dimana perencanaan digunakan untuk melihat kedepan terkait dengan tindakan apa yang seharusnya diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap kementerian dan lembaga terlebih dahulu melakukan penelaahan atas perencanaan terkait dengan program dan kegiatan yang terdapat dalam APBN.

Begitu juga pada SKPD melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan terkait dengan program yang terdapat dalam APBD. Penelaahan yang dilakukan tersebut untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan tahun anggaran berjalan. Sehingga tidak ada anggaran kegiatan yang diblokir yang mengakibatkan anggaran tidak dapat dicairkan. Sehingga akan mempengaruhi realisasi anggaran belanja yang menumpuk diakhir tahun.

Penelitian yang dilakukan oleh Hendris Herriyanto (2012:63) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Jakarta memberikan hasil bahwa perencanaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Item pembentuk faktor perencanaan adalah anggaran

kegiatan diblokir, SK panitia lelang terlambat ditetapkan, terlambatnya penyusunan jadwal pelaksanaan lelang, terlambatnya dalam pengesahan dokumen pengumuman lelang, DIPA perlu direvisi karena tidak sesuai dengan kebutuhan, dan pelaksanaan kegiatan/proyek tidak melihat rencana/jadwal yang tercantum dalam DIPA.

Begitu juga dalam penelitian ini penulis ingin menguji apakah faktor dokumen perencanaan mempengaruhi realisasi anggaran. Ketika dokumen perencanaan lengkap dan pemenuhan dokumen tepat waktu, maka uang persediaan akan dapat segera cair. Uang persediaan tersebut nantinya dapat digunakan untuk membiayai program kegiatan yang tercantum dalam DPA, sehingga program kegiatan dalam DPA dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan anggaran dapat terealisasi secara proporsional. Berdasarkan tinjauan teori dan tinjauan empiris, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut.

H1: Faktor dokumen perencanaan berpengaruh terhadap realisasi anggaran belanja.

2.4.2. Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Realisasi Anggaran Belanja

Salah satu faktor utama yang menentukan baik atau tidak jalannya roda pemerintahan adalah sumber daya manusia. Hal ini terlihat dari bagaimana manusia sebagai tenaga kerja menggunakan potensi fisik dan psikis yang ia miliki secara maksimal dalam mencapai tujuan organisasi (lembaga). Pemerintah serta struktur dibawahnya sebaiknya mampu mewujudkan impian masyarakat melalui pembangunan daerah, karena pemerintah yang memiliki jabatan dan kuasa sebagai pengelola keuangan memiliki peran penting guna perwujudan harapan masyarakat. Fungsi pemerintah sebagai SDM dapat diwujudkan dalam

prakteknya melalui kegiatan pemerintah sebagai pengelola keuangan negara dalam penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Penelitian yang dilakukan oleh Hendris Herriyanto (2012:70) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Jakarta memberikan hasil bahwa sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Dengan item pembentuk faktor sumber daya manusia antara lain: SDM pelaksana kurang kompeten, rangkap tugas dalam jabatan panitia pengadaan, ketakutan pejabat untuk melaksanakan pengadaan akibat pemberitaan penangkapan pejabat atas tuduhan korupsi, keengganan untuk menjadi pejabat pengadaan karena tidak seimbangnya resiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima, dan SK penunjukan panitia pelaksana kegiatan swakelola belum ditetapkan.

Dalam penelitian ini penulis ingin menguji apakah faktor kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap realisasi anggaran belanja. Karena pegawai yang kompeten dan ahli dibidang penatausahaan keuangan, akan mempengaruhi dalam merealisasikan anggaran belanja. Pegawai yang cakap dalam penyusunan anggaran dan program kegiatan yang tepat, akan lebih mudah untuk merealisasikan anggaran agar dapat terealisasi secara proporsional. Sehingga anggaran yang menumpuk diakhir tahun dapat dihindari.

Berdasarkan tinjauan teori dan tinjauan empiris, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut.

H2: Faktor kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap realisasi anggaran belanja.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode survey. Pengertian metode deskriptif menurut Nawawi (2003:25),

Metode deskriptif yaitu metode-metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat.

Metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian deskriptif adalah metode survey. Menurut Singarimbun (2006:16) “metode survey adalah penelitian yang mengambil sample dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok”.

3.2. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu dengan alamat di Jl. Bantilan No. 25 Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah.

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Mei 2016 dan dilakukan secara bertahap.

1. Tahap persiapan dilaksanakan pada bulan Mei - November 2016 meliputi pengajuan judul dan pembuatan proposal.
2. Tahap penelitian dilaksanakan pada bulan November 2016 meliputi pembuatan angket dan pengumpulan data.
3. Tahap penyelesaian bulan November 2016 - Januari 2017 dengan kegiatan pengolahan data sampai selesai.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Menurut Sugiyono (2004:72) “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pejabat struktural, pegawai pengelola keuangan dan kegiatan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu dengan jumlah populasi sebanyak 75 pegawai.

3.3.2. Sampel

Sugiyono (2004:73) berpendapat bahwa “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi”. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah pejabat struktural, pegawai pengelola keuangan dan kegiatan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu. Sehingga penelitian ini disebut penelitian populasi. Sesuai pernyataan Sabar (2007:41) “apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau study sensus”.

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Berdasarkan sifatnya, penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut.

1. Data Kuantitatif adalah data yang dapat dihitung atau data yang dapat berupa angka-angka. Dalam penelitian ini data berupa laporan realisasi anggaran belanja pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu.

2. Data Kualitatif adalah data yang tidak dapat dihitung atau data yang bersifat kualitatif, berupa perkembangan organisasi, struktur organisasi, dan data-data lain yang berhubungan dengan penyusunan penelitian ini.

3.4.2. Sumber Data

Adapun data yang telah dikumpulkan oleh penulis dikelompokkan berdasarkan sumbernya yaitu.

1. Data Primer

"Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data" (Sugiyono, 2004:29). Data primer diperoleh secara langsung dari daerah penelitian atau data yang berasal dari sumber asli yang dikumpulkan secara khusus untuk keperluan penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini data primer berupa laporan realisasi anggaran belanja pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu.

2. Data Sekunder

"Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul" (Sugiyono, 2004:29). Data sekunder dikumpulkan dari sumber lain yang berguna untuk memperkuat data yang disajikan pada data primer.

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu jurnal-jurnal ilmiah, dokumen-dokumen perusahaan, literature, serta artikel yang relevan dengan objek penelitian.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

3.5.1. Riset Lapangan (*field research*)

Yaitu mengumpulkan data-data primer dengan datang langsung ke Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu kemudian melakukan.

1. Wawancara, dengan menanyakan secara langsung kepada pegawai Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu yang terkait guna pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan usulan penelitian ini.
2. Observasi, dengan mengadakan peninjauan secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang berhubungan dengan proses realisasi anggaran belanja.
3. Kuesioner, dengan pertanyaan tertutup berupa suatu daftar pertanyaan yang diberikan atau disebarkan kepada responden untuk diisi berdasarkan persepsi masing-masing responden dari SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu dengan menggunakan skala *Likert*. Jawaban skala *Likert* dalam penelitian ini terdiri dari lima pilihan, yakni : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Pemberian nilai (*scoring*) untuk jawaban Sangat Setuju (SS) diberikan nilai 5, dan seterusnya menurun sampai pada jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) yang diberikan nilai 1.

3.5.2. Riset Pustaka (*library research*)

Yaitu dengan mempelajari buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, serta melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian.

3.6. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan dengan jelas oleh seorang peneliti agar dalam pengumpulan data dapat terarah sesuai dengan tujuan penelitian. “Variabel adalah suatu konsep yang memiliki dua nilai atau lebih data suatu permasalahan” (Rumidi, 2002:10). Penelitian ini terdapat variabel bebas dan variabel terikat. Adapun penjabarannya sebagai berikut.

1. Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

“Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat” (Sugiyono, 2004:39) Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah faktor dokumen perencanaan dan faktor kompetensi sumber daya manusia.

2. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

“Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas” (Sugiyono, 2004:40). Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah realisasi anggaran belanja.

3.6.2. Definisi Operasional

Realisasi anggaran belanja merupakan tindakan menindaklanjuti rencana anggaran sesuai dengan alokasi dana yang telah tertuang di dalam APBD, anggaran dapat terserap secara maksimal ataupun tidak. Saat ini di Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu mengalami realisasi anggaran yang rendah di awal tahun. Realisasi anggaran yang rendah di awal tahun ini disebabkan selain karena tidak dijalankannya program-program yang sudah direncanakan mengingat anggaran yang besar sudah disetujui dan juga karena adanya kemungkinan dalam pelaksanaan program terdapat beberapa hambatan yang dapat menunda terselesaikannya program sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pada penelitian ini akan dilihat apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat realisasi anggaran belanja pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu.

1. Faktor Dokumen Perencanaan

Perencanaan program kerja dan kegiatan menjadi satu kesatuan dengan perencanaan anggaran, sehingga program kerja dan kegiatan yang direncanakan akan sesuai dengan kemampuan pembiayaan yang tersedia. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan.

Berkaca pada sistem penganggaran yang sedang kita laksanakan saat ini (yang menghasilkan produk dokumen anggaran/RKA-SKPD) dan sistem perencanaan (yang menghasilkan produk dokumen perencanaan DPA SKPD) maka, kedua produk tersebut harusnya ada benang merah secara substansi. Apa yang tertuang dalam dokumen perencanaan beserta informasi di dalamnya (*outcome* dan indikator kinerja pada tingkat program/kegiatan) seharusnya dapat dioperasionalkan dalam dokumen penganggaran.

Hal tersebut tidak terlihat selama ini, dikarenakan masih sering terjadi adanya anggaran kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan SKPD sehingga menyebabkan perencanaan-perencanaan yang tertuang didalam dokumen perencanaan perlu dilakukan revisi. Jadi dapat dikatakan bahwa keterkaitan yang ada pada kedua dokumen tersebut hanya sebatas pada nama program dan kegiatan.

Dari pernyataan tersebut maka faktor dokumen perencanaan memiliki hubungan dengan realisasi anggaran belanja. Pada penelitian ini akan dilihat apakah dokumen perencanaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran atau tidak. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert lima poin dengan butir pertanyaan sebanyak delapan pertanyaan dalam sebuah kuesioner.

2. Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia juga merupakan potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan tujuannya. Kompetensi sumber daya manusia memiliki hubungan erat dengan perencanaan, dimana terdapat tujuan dari perencanaan yang telah dibuat baik untuk kepentingan individu, kepentingan organisasi, dan kepentingan nasional (dalam hal ini adalah SKPD). Kompetensi sumber daya manusia memiliki hubungan yang erat dengan realisasi anggaran belanja. Sumber daya manusia sangat diperlukan sebagai pelaksana dan pengelola kegiatan yang kompeten serta panitia pejabat/pelaksana pengadaan barang dan jasa sebaiknya memiliki sertifikat dan berkompetensi karena jika pegawai dalam suatu SKPD sebagai pelaksana pengadaan barang dan jasa kurang berkompeten dan tidak memiliki sertifikat maka dapat menyebabkan pelaksanaan atas pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Bukan hanya itu saja pelaksana dan pengelola kegiatan yang melaksanakan tugas lebih dari satu (rangkap tugas) juga mempengaruhi kualitas pekerjaan dalam merealisasikan anggaran. Adanya pejabat dan pegawai pengelola kegiatan yang sering mengalami mutasi antar SKPD dapat mempengaruhi kesinambungan rencana program dan kegiatan SKPD, serta belum diterapkannya mekanisme *reward* dan *punishment* terhadap pegawai juga mempengaruhi dalam pencapaian realisasi anggaran belanja.

Sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap realisasi anggaran belanja. Sehingga faktor kompetensi SDM menjadi salah satu variabel independen pada penelitian ini. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert lima poin dengan butir pertanyaan sebanyak delapan pertanyaan dalam sebuah kuesioner.

3.7. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini adalah kuesioner. Skala pengukuran kuesioner ini menggunakan skala likert 1 – 5 poin sebagai berikut.

1. Skala 1 mengindikasikan sangat tidak setuju.
2. Skala 2 mengindikasikan tidak setuju.
3. Skala 3 mengindikasikan kurang setuju.
4. Skala 4 mengindikasikan setuju.
5. Skala 5 mengindikasikan sangat setuju.

Skala ini digunakan untuk memperoleh derajat persepsi responden atas setiap pertanyaan yang tercermin dalam skala yang dipilih. Pengukuran instrumen dalam penelitian ini dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

3.7.1. Uji Validitas

“Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen atau suatu test” (Arikunto, 2006:151). Validitas alat ukur uji dengan menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari setiap butir pertanyaan dengan kesulitan yang diperoleh pada alat ukur tersebut.

Untuk mengukur validitas item atau butir soal dapat digunakan rumus *korelasi product moment dari Karl Pearson*, yang terdiri dari korelasi product moment dengan simpangan dan *korelasi product moment* dengan angka kasar.

Nilai korelasi (r) dibandingkan dengan angka kritis dalam tabel korelasi. Untuk menguji koefisien korelasi ini digunakan *level of signifikan* 5%. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka butir soal tersebut valid. Sebaliknya jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka butir soal tersebut tidak valid. Pengujian validitas butir soal dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS for windows 23.

3.7.2. Uji Reliabilitas

Persyaratan pokok kedua yang harus dipenuhi agar alat ukur dikatakan baik yaitu reliabilitas. Angket dikatakan reliabel apabila angket dapat dipercaya untuk digunakan sebagai syarat pengumpulan data, semakin tinggi reliabelnya maka semakin baik pula alat ukur tersebut. Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulang dua kali atau lebih.

Untuk menguji reliabilitas instrumen ini penulis menggunakan aplikasi SPSS 23 dengan metode *Cronbach Alpha*. Suatu konstruksi atau variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$.

3.8. Analisis Data

3.8.1. Uji Normalitas

“Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak” (Ghozali, 2011:69). Uji normalitas residual dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov test dengan taraf signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan nilai Sig $\geq 0,05$ maka dikatakan berdistribusi normal. Jika nilai Sig $< 0,05$ maka dikatakan berdistribusi tidak normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS *for windows* 23.

3.8.2. Analisis Regresi Linier Berganda

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan alat analisis statistik yakni analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh faktor dokumen perencanaan (X1) dan faktor kompetensi SDM (X2), terhadap realisasi anggaran belanja (Y). Analisis regresi ganda menggunakan rumus sebagai berikut.

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = realisasi anggaran belanja

a = Konstanta

X₁ = faktor dokumen perencanaan

X₂ = faktor kompetensi SDM

b₁, b₂ = Koefisien regresi untuk X₁, X₂

e = *error term*

Sementara itu untuk menilai ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual penelitian ini akan menilai *goodnes of fit* suatu model. Penilaian ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi (R²), nilai statistik F, dan nilai statistik t.

3.8.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi ini adalah antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas. Nilai yang hampir mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.

3.8.4. Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 (α), maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Langkah pertama menentukan formulasi H_0 dan H_1 , dimana $H_0 = b_1 = b_2 = 0$, berarti tidak ada pengaruh faktor dokumen perencanaan dan faktor kompetensi SDM terhadap realisasi anggaran belanja. $H_1 \neq b_1 \neq b_2 \neq 0$, berarti terdapat pengaruh faktor dokumen perencanaan dan faktor kompetensi SDM terhadap realisasi anggaran belanja. Kemudian melakukan kriteria pengujian Uji F (H_0 diterima apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$).

3.8.5. Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh atau variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria pengujian dilakukan berdasarkan probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 (α), maka variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun jika probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 (α), maka variabel independen secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Organisasi

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu merupakan instansi yang mempunyai tanggung jawab untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan pertanian khususnya dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan peningkatan ketahanan pangan. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Palu mempunyai peran strategis dalam pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan bahan baku industri, memperluas lapangan usaha, meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, serta menjaga kelestarian lingkungan.

Sejalan otonomi daerah, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu mempunyai kesempatan untuk meningkatkan peran serta pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan yang mana sektor-sektor tersebut membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional yang mampu memanfaatkan sumber daya alam, peluang pasar sesuai kondisi spesifik lokal. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang diarahkan menjadi keunggulan kompetitif (Competitive Advantage) akan memberikan pengaruh pada peningkatan pendapatan petani sehingga tingkat kesejahteraan meningkat. Dengan demikian secara tidak langsung akan mengurangi angka kemiskinan khususnya disektor pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah Kota Palu.

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu sesuai Perda Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 mempunyai tugas pokok membantu

kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada visi Kota Palu yaitu "Palu Kota Jasa, Berbudaya dan Beradat dilandasi Iman dan Takwa". Sedangkan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu menetapkan visi SKPD yaitu " Terwujudnya Pelaku Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang Ulet, Tangguh dan Mandiri Menuju Ketahanan Pangan Kota Palu".

Dalam mewujudkan visi tersebut di atas, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu menterjemahkan kedalam 2 sektor sesuai tupoksi yaitu.

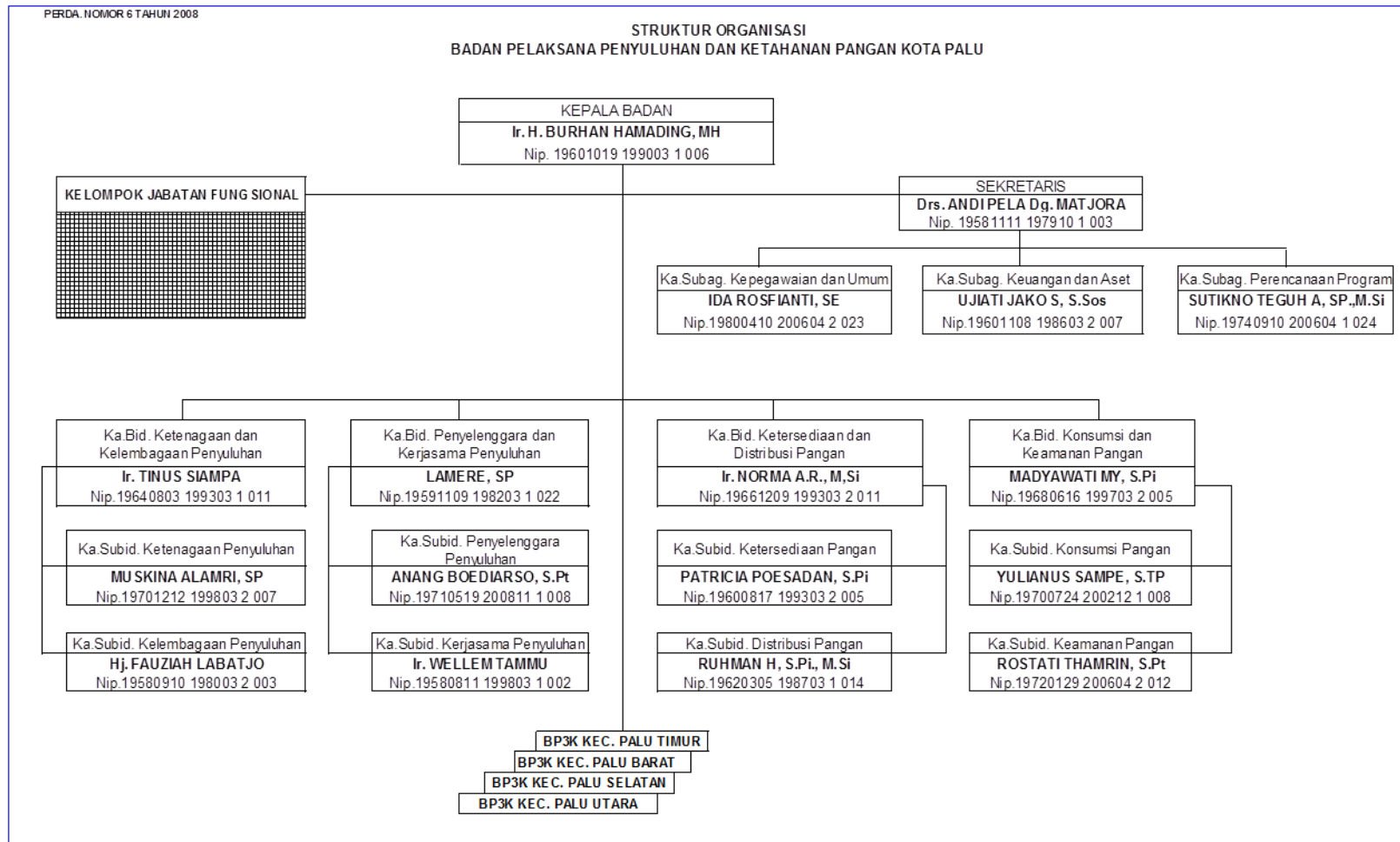
1. Sektor penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dengan indikator kinerja yaitu peningkatan SDM (pengetahuan, keterampilan dan sikap) petani/nelayan dan penyuluh dalam mendukung pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berwawasan agribisnis.
2. Sektor ketahanan pangan, dengan indikator kinerja pemantapan pemenuhan pangan (distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan) penanganan daerah rawan pangan serta pemanfaatan pangan alternatif dalam menunjang ketahanan pangan daerah.

4.1.1. Struktur Organisasi dan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi)

Tugas pokok dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu termaktub dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 6 Tahun 2008 yaitu melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Struktur organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu seperti di bawah ini.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu



Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum BP2KP Kota Palu

Dari struktur organisasi diatas dapat diuraikan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.

1. Kepala Badan

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan
- b. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas bidang penyuluhan dan ketahanan pangan
- c. Penyelenggaraan ketatausahaan dan tatalaksana
- d. Penyelenggaraan pembinaan, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan
- e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai tugas pokok dan fungsi.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam rangka penyusunan program dan tugas pelayanan administrasi secara terpadu dan terkoordinasi dengan bidang-bidang sesuai ruang lingkup tugas satuan organisasi.

Sekretariat terdiri dari.

a. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi, perbendaharaan dan pengelolaan aset serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi kepegawaian dan disiplin, pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan dan kehumasan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

c. Sub Bagian Perencanaan Program

Mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan program kerja, melaksanakan analisa dan penyiapan rancangan kebijakan teknis bidang perencanaan program, melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian, menganalisa data dan informasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan Penyuluhan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan analisa dan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dibidang ketenagaan dan kelembagaan penyuluhan, pengembangan, penyusunan program rencana teknis, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok bidang ketenagaan dan kelembagaan penyuluhan menyelenggarakan fungsi.

a. Penyusunan rencana dan program kerja

b. Penyelenggaraan persiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dibidang ketenagaan dan kelembagaan penyuluhan

c. Penyelenggaraan penyusunan data base

- d. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penelitian, pengembangan dan statistik dalam rangka pengembangan sistim perencanaan ketenagaan dan kelembagaan penyuluhan
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan penelitian, pengembangan ketenagaan dan kelembagaan penyuluhan.

Bidang ketenagaan dan kelembagaan penyuluhan terdiri dari.

a. Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan

Mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, merumuskan kebijakan teknis program pelaksanaan ketenagaan penyuluhan, evaluasi, pemantauan dan penyusunan laporan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

b. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan

Mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, menyusun rencana dan program, pemantauan, penelitian, pengembangan, survey, study kelayakan dan penyusunan rancangan perencanaan program teknis bidang kelembagaan penyuluhan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

4. Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan data dan bahan, kebijakan teknis, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan, pengembangan, penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok bidang penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan menyelenggarakan fungsi.

- a. Penyusunan rencana dan program kerja
- b. Pengolahan data dan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan pembangunan bidang penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan
- c. Pengelolaan koordinasi dan integrasi rencana pembangunan bidang penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan yang disusun oleh perangkat daerah ,instansi lainnya serta kecamatan
- d. Pengelolaan inventarisasi bidang penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan
- e. Pengkoordinasian penyusunan program pembangunan tahunan bidang penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan
- f. Pelaksanaan penelitian/pengkajian dokumen teknis bidang penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan
- g. Penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan dibidang penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Bidang penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan terdiri dari.

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan

Mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data, penyusunan rencana dan program kerja, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pengkoordinasian penyusunan rencana dan program pembangunan bidang penyuluhan, penyiapan bahan bimbingan teknis kerjasama antar daerah, konsultasi dengan instansi terkait, evaluasi, pemantauan dan penyusunan laporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Sub Bidang Kerjasama Penyuluhan

Mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data, penyusunan rencana dan program kerja, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerjasama penyuluhan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

5. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan data dan bahan, kebijakan teknis, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan dan pengembangan, menyelenggarakan penelitian, studi kelayakan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok bidang ketersediaan dan distribusi pangan menyelenggarakan fungsi.

- a. Penyusunan rencana dan program kerja
- b. Pengolahan data dan bahan ,penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan pembangunan bidang ketersediaan dan distribusi pangan
- c. Pengelolaan koordinasi dan integrasi rencana ketersediaan dan distribusi pangan yang disusun oleh perangkat daerah, instansi lainnya serta kecamatan
- d. Pengelolaan inventarisasi bidang ketersediaan dan distribusi pangan
- e. Pengkoordinasian penyusunan program pembangunan tahunan bidang ketersediaan dan distribusi pangan
- f. Pelaksanaan penelitian/pengkajian dokumen teknik dibidang ketersediaan dan distribusi pangan

- g. Penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Bidang ketersediaan dan distribusi pangan terdiri dari.

a. Sub Bidang Ketersediaan Pangan

Mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data, penyusunan rencana dan program kerja, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pengkoordinasian penyusunan rencana dan program pembangunan bidang penyediaan pangan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Sub Bidang Distribusi Pangan.

Mempunyai tugas pokok dan dan fungsi melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data, penyusunan rencana dan program kerja, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pengkoordinasian penyusunan rencana dan program pembangunan bidang distribusi pangan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan data dan bahan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang konsumsi dan keamanan pangan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok bidang konsumsi dan keamanan menyelenggarakan fungsi.

- a. Penyusunan rencana dan program kerja
- b. Pengolahan data dan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang konsumsi dan keamanan pangan
- c. Pengelolaan koordinasi dan integrasi rencana pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang konsumsi dan keamanan pangan yang disusun oleh perangkat daerah, instansi lainnya serta kecamatan
- d. Pemantauan evaluasi dan penyusunan laporan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Bidang konsumsi dan keamanan pangan terdiri dari.

- a. Sub Bidang Konsumsi Pangan

Mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program dan rencana kerja, melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis bidang konsumsi pangan, pelaksanaan pengendalian kegiatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

- b. Sub Bidang Keamanan Pangan

Mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program dan rencana kerja, melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis bidang keamanan pangan, pemantauan, pelaksanaan evaluasi dan monitoring kegiatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4.2. Deskripsi Data

4.2.1. Karakteristik Responden

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengantarkan langsung kuesioner kepada responden di Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu. Kuesioner yang disebar sebanyak 75 yaitu sejumlah pegawai penatausahaan keuangan dan pengelola kegiatan yang meliputi pejabat struktural, pejabat pengguna anggaran, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Staf pengelola keuangan dan kegiatan.

Tahap pengumpulan data dilakukan sejak tanggal 21-29 november 2016. Dari 75 kuesioner yang disebar, sebanyak 72 kuesioner yang kembali (96%). Dari 72 kuesioner yang kembali tersebut sebanyak 67 dapat diolah (93,1%), sedangkan 5 kuesioner tidak dapat diolah (6,9%). Kuesioner tidak dapat diolah karena responden tidak mengisi secara lengkap seluruh pertanyaan yang diajukan. Distribusi kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Distribusi Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase (%)
1.	Kuesioner yang disebar	75	100
2.	Kuesioner yang kembali	72	96
3.	Kuesioner yang tidak kembali	3	4
4.	Kuesioner yang tidak dapat diolah	5	6,9
5.	Kuesioner yang diolah	67	93,1

4.2.2. Demografi Responden

Dari 67 kuesioner yang diolah dapat diketahui mengenai demografi responden yaitu jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, lama bekerja dan jabatan. Rincian demografi responden dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Demografi Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin		
1. Laki-laki	30 orang	44,78%
2. Perempuan	37 orang	55,22%
Umur		
1. 18 – 30 tahun	12 orang	17,91%
2. 31 – 40 tahun	20 orang	29,85%
3. 41 – 50 tahun	21 orang	31,34%
4. ≥ 51 tahun	14 orang	20,90%
Pendidikan terakhir		
1. SMA	5 orang	7,46%
2. D III	2 orang	2,99%
3. S1/D IV	49 orang	73,13%
4. S2	11 orang	16,42%
Lama bekerja		
1. ≤ 5 tahun	11 orang	16,42%
2. 6 - 10 tahun	21 orang	31,34%
3. 11- 20 tahun	13 orang	19,40%
4. 21-30 tahun	18 orang	26,87%
5. ≥31 tahun	4 orang	5,97%
Jabatan		
1. Pejabat Struktural	27 orang	40,30%
2. Staf	40 orang	59,70%

Tabel Demografi Responden di atas menunjukkan, bila dari segi jenis kelamin dari 67 responden sebanyak 30 orang atau 44,78% berjenis kelamin laki-laki sementara 37 orang atau 55,22% berjenis kelamin perempuan. Dari segi umur, 12 orang atau 17,91% berusia 18-30 tahun, 20 orang atau 29,85% berusia 31-40 tahun, 21 orang atau 31,34% berusia 41-50 tahun dan 14 orang atau 20,90% berusia diatas 51 tahun.

Dilihat pendidikan terakhirnya, dari 67 responden sebanyak 5 orang atau 7,46% memiliki jenjang pendidikan SMA, 2 orang atau 2,99% memiliki jenjang pendidikan DIII, 49 orang atau 73,13% memiliki jenjang pendidikan S1 dan 11 orang atau 16,42% memiliki jenjang pendidikan S2. Dari segi lama bekerja 11 orang atau 16,42% memiliki pengalaman bekerja selama kurang dari 5 tahun, 21 orang atau 31,34% memiliki pengalaman bekerja selama 6-10 tahun, 13 orang atau 19,40% memiliki pengalaman bekerja selama 11-20 tahun, 18 orang atau 26,87% memiliki pengalaman bekerja selama 21-30 tahun, dan 4 orang atau 5,97% memiliki pengalaman bekerja selama lebih dari 31 tahun. Sementara itu bila dilihat dari jabatan dalam struktur organisasi sebanyak 27 orang atau 40,30% sebagai pejabat struktural, 40 orang atau 59,70% sebagai staf.

4.3. Analisis Data

4.3.1. Hasil Uji Kualitas Data

4.3.1.1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Uji validitas dilakukan dengan melakukan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Pengujian validitas ini dengan menggunakan *pearson correlation* program IBM SPSS 23.

Hasil uji validitas pada tiga variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Faktor Dokumen Perencanaan (Variabel X1)

Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas Variabel Faktor Dokumen Perencanaan

Variabel	Item	Validitas		
		<i>Pearson Correlation</i>	<i>r Table</i>	Keterangan
X1	Dok Prcn 1	0,564	0,203	Valid
	Dok Prcn 2	0,598	0,203	Valid
	Dok Prcn 3	0,437	0,203	Valid
	Dok Prcn 4	0,619	0,203	Valid
	Dok Prcn 5	0,565	0,203	Valid
	Dok Prcn 6	0,787	0,203	Valid
	Dok Prcn 7	0,616	0,203	Valid
	Dok Prcn 8	0,560	0,203	Valid

Sumber : Hasil olah data (2016) melalui program IBM SPSS 23.

Hasil uji validitas variabel faktor dokumen perencanaan (X1) didapatkan hasil bahwa dari 8 butir item pernyataan untuk variabel faktor dokumen perencanaan (X1) semuanya valid. Hal ini ditunjukkan oleh hasil perhitungan diperoleh nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} (0,203), dengan demikian butir pernyataan untuk mengungkap tentang faktor dokumen perencanaan (X1) layak dipergunakan sebagai instrument penelitian.

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia(Variabel X2)

Tabel 4.4. Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

Variabel	Item	Validitas		
		<i>Pearson Correlation</i>	<i>r Table</i>	Keterangan
X2	Komp SDM 1	0,437	0, 203	Valid
	Komp SDM 2	0,584	0, 203	Valid
	Komp SDM 3	0,511	0, 203	Valid
	Komp SDM 4	0,707	0, 203	Valid
	Komp SDM 5	0,466	0, 203	Valid
	Komp SDM 6	0,714	0, 203	Valid
	Komp SDM 7	0,531	0, 203	Valid
	Komp SDM 8	0,702	0, 203	Valid

Sumber : Hasil olah data (2016) melalui program IBM SPSS 23.

Hasil uji validitas variabel faktor kompetensi sumber daya manusia (X2) didapatkan hasil bahwa dari 8 butir item pernyataan untuk variabel faktor kompetensi sumber daya manusia (X2) semuanya valid. Hal ini ditunjukkan oleh hasil perhitungan diperoleh nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} (0,203), dengan demikian butir pernyataan untuk mengungkap tentang faktor kompetensi sumber daya manusia (X2) layak dipergunakan sebagai instrument penelitian.

3. Realisasi Anggaran Belanja (Variabel Y)

Tabel 4.5. Hasil Uji Validitas Variabel Realisasi Anggaran Belanja

Variabel	Item	Validitas		
		<i>Pearson Correlation</i>	<i>r Table</i>	Keterangan
Y	RAB 1	0,721	0, 203	Valid
	RAB 2	0,803	0, 203	Valid
	RAB 3	0,756	0, 203	Valid
	RAB 4	0,764	0, 203	Valid

Sumber : Hasil olah data (2016) melalui program IBM SPSS 23.

Hasil uji validitas variabel realisasi anggaran belanja (Y) didapatkan hasil bahwa dari 4 butir item pernyataan untuk variabel realisasi anggaran belanja (Y) semuanya valid. Hal ini ditunjukkan oleh hasil perhitungan diperoleh nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} (0,203), dengan demikian butir pernyataan untuk mengungkap tentang realisasi anggaran belanja (Y) layak dipergunakan sebagai instrument penelitian.

4.3.1.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah kepercayaan atau ketetapan suatu tes, apabila diteskan terhadap subyek yang sama. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan pengujian *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai Cronbach Alpha $> 0,70$. Hasil uji reliabilitas pada tiga variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas Masing-Masing Variabel

Variabel	Reliabilitas	
	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Faktor dokumen perencanaan	0,740	Reliabel
Faktor kompetensi SDM	0,723	Reliabel
Realisasi Anggaran Belanja	0,759	Reliabel

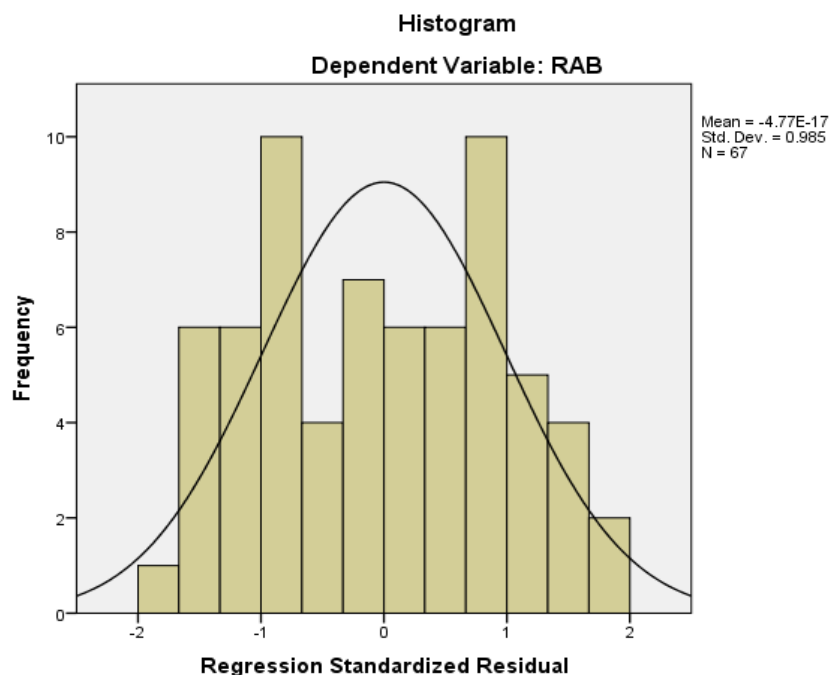
Sumber : Hasil olah data (2016) melalui program IBM SPSS 23.

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil uji reliabilitas koefisien *Cronbach's Alpha* untuk variabel faktor dokumen perencanaan, faktor kompetensi sumber daya manusia dan realisasi anggaran belanja. masing-masing sebesar 0,740; 0,723 dan 0,759, seluruhnya lebih besar dari 0,70. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa instrumen variabel ini reliabel (dapat diandalkan) sebagai alat pengukur variabel penelitian.

4.3.2. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas dengan pendekatan OLS yaitu data residual yang dibentuk model regresi linear terdistribusi normal, bukan variabel bebas ataupun variabel terikatnya. Kriteria sebuah data residual terdistribusi normal atau tidak dengan pendekatan grafik histogram dan normal P-P Plot dengan melihat sebaran titik-titik yang ada pada gambar. Apabila sebaran titik-titik tersebut mendekati atau rapat pada garis lurus (diagonal) maka dikatakan bahwa (data) residual terdistribusi normal, namun apabila sebaran titik-titik tersebut menjauhi garis maka tidak terdistribusi normal. Berikut ini gambar grafik histogram dan normal P-P Plot hasil uji normalitas.

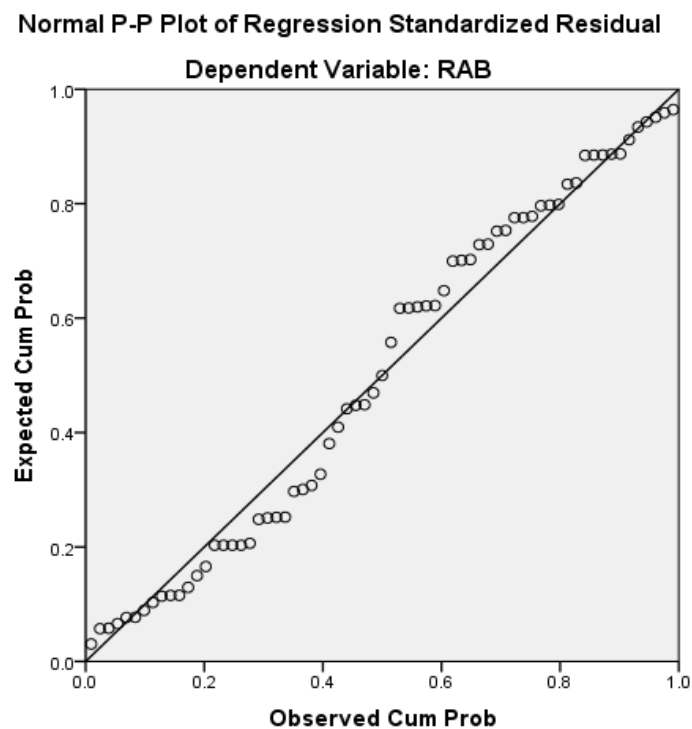
Gambar 4.2 Grafik Histogram Uji Normalitas



Sumber : Hasil olah data (2016) melalui program IBM SPSS 23.

Dengan melihat tampilan grafik histogram di atas dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang normal, tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Oleh karena itu model regresinya telah memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4.3 Normal P-P Plot Uji Normalitas



Sumber : Hasil olah data (2016) melalui program IBM SPSS 23.

Berdasarkan gambar normal *probability plot* di atas dapat disimpulkan bahwa telah berpola distribusi yang normal, karena sebaran titik-titik tersebut mendekati atau rapat pada garis lurus (diagonal). Oleh karena itu model regresinya telah memenuhi asumsi normalitas.

4.3.3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh faktor dokumen perencanaan dan faktor kompetensi sumber daya manusia terhadap realisasi anggaran belanja. Adapun model persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2$$

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan program IBM SPSS 23 diperoleh hasil sebagai berikut (lihat lampiran 7).

Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	t _{hitung}	Signifikansi
Konstanta	2,216		
Faktor Dokumen Perencanaan	0,206	3,733	0,000
Faktor Kompetensi SDM	0,199	3,624	0,001
R ²	0,617		
F Statistik	54,188		0,000

Sumber : Hasil olah data (2016) melalui program IBM SPSS 23.

Berdasarkan hasil regresi diatas, maka dapat disusun persamaan sebagai berikut.

$$Y = 2,216 + 0,206.X_1 + 0,199.X_2$$

Interpretasi dari persamaan tersebut adalah.

a = 2,216, berarti jika skor faktor dokumen perencanaan dan faktor kompetensi sumber daya manusia dianggap 0 atau tidak ada, maka realisasi anggaran belanja hanya sebesar 2,216.

b₁ = 0,206, berarti jika skor faktor dokumen perencanaan meningkat satu poin maka realisasi anggaran belanja akan meningkat sebesar 0,206 sehingga asumsinya realisasi anggaran belanja semakin meningkat (dengan asumsi faktor kompetensi sumber daya manusia dianggap konstan).

$b_2 = 0,199$, berarti jika skor faktor kompetensi sumber daya manusia meningkat satu poin maka realisasi anggaran belanja akan meningkat sebesar 0,199 sehingga asumsinya realisasi anggaran belanja semakin meningkat (dengan asumsi faktor dokumen perencanaan dianggap konstan).

4.3.4. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini diperoleh nilai sebesar 0,617 (lampiran 7). Angka koefisien determinasi ini menyatakan bahwa besarnya pengaruh variabel faktor dokumen perencanaan dan faktor kompetensi sumber daya manusia adalah sebesar 61,7%, sedangkan sisanya sebesar 38,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.4. Pengujian Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS 23.

4.4.1. Hasil Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor dokumen perencanaan dan faktor kompetensi SDM secara bersama-sama terhadap realisasi anggaran belanja. Prosedur perhitungan uji F adalah sebagai berikut.

1. Menentukan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a)

$H_0 = b_1 = b_2 = 0$ (tidak terdapat pengaruh faktor dokumen perencanaan dan faktor kompetensi SDM secara bersama-sama terhadap realisasi anggaran belanja).

$H_a = b_1 \neq b_2 \neq 0$ (terdapat pengaruh faktor dokumen perencanaan dan faktor kompetensi SDM secara bersama-sama terhadap realisasi anggaran belanja)

2. Menentukan *level of significance* (α) = 5%
3. Menentukan F_{tabel} dengan derajat kebebasan (db) = $k; N-k-1$
 Dimana k adalah jumlah variabel bebas dan N adalah jumlah sampel, sehingga $F_{\text{tabel}} = 0,05 (2;64)$ adalah 3,14
4. Kriteria pengujian
 Ho diterima apabila $F_{\text{hitung}} \leq 3,14$
 Ho ditolak apabila $F_{\text{hitung}} > 3,14$
5. Menghitung nilai F
 Perhitungan uji F menggunakan SPSS 23 *for windows* memperoleh nilai F sebesar 54,188 dengan nilai $p\text{-value} = 0,000$ (Lampiran 7)
6. Kesimpulan
 Dari hasil uji F diketahui bahwa $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ ($54,188 > 3,14$) dengan $p < 0,05$, maka Ho ditolak berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor dokumen perencanaan dan faktor kompetensi SDM secara bersama-sama terhadap realisasi anggaran belanja dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima kebenarannya. Bahwa tinggi rendahnya realisasi anggaran belanja dipengaruhi oleh faktor dokumen perencanaan dan faktor kompetensi SDM.

4.4.2. Hasil Uji t

Uji t ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual (parsial) dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini.

Tabel 4.8 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	2.216	1.208		1.834
	Dok.Prcn	.206	.055	.430	3.733
	Komp.SDM	.199	.055	.418	3.624

a. Dependent Variable RAB

Sumber : Hasil olah data (2016) melalui program IBM SPSS 23.

Dari tabel 4.8 di atas pengujian hipotesis dapat diuraikan sebagai berikut.

1. H_1 : faktor dokumen perencanaan berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran belanja.

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai t sebesar 3,733 lebih besar dibanding nilai t_{tabel} sebesar 1,9977 (df = 64; tingkat signifikansi 0,05) dengan signifikansi 0,000 lebih rendah dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel dokumen perencanaan berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran belanja. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima.

2. H_2 : faktor kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran belanja.

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai t sebesar 3,624 lebih besar dibanding nilai t_{tabel} 1,9977 (df = 64; tingkat signifikansi 0,05) dengan signifikansi 0,001 lebih rendah dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel faktor kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran belanja. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima.

4.5. Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

Pembahasan hasil pengujian hipotesis berdasarkan tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut.

4.5.1. Pengaruh Faktor Dokumen Perencanaan terhadap Realisasi Anggaran Belanja

Dokumen perencanaan merupakan proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu dimasa yang akan datang. Dokumen perencanaan dalam penelitian ini didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program kegiatan sehingga dapat merealisasikan anggarannya.

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa dokumen perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi anggaran belanja. Hasil pengujian hipotesis pertama memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,733 diterima pada taraf signifikansi 5% ($p < 0,05$). Hal ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh faktor dokumen perencanaan terhadap realisasi anggaran belanja. Hal ini mengindikasikan bahwa dokumen perencanaan SKPD berkontribusi penting terhadap tingkat realisasi penyerapan anggaran. Semakin baik dokumen perencanaan yang disusun oleh SKPD maka semakin baik dalam melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan sehingga realisasi anggaran belanja dapat terserap secara optimal.

4.5.2. Pengaruh Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Realisasi Anggaran Belanja

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Kompetensi SDM dalam penelitian ini didasarkan pada tingkat pendidikan dan keahlian yang digunakan sebagai kemampuan seseorang dalam melaksanakan program kegiatan SKPD sehingga dapat merealisasikan anggarannya dengan baik.

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi anggaran belanja. Hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,624 diterima pada taraf signifikansi 5% ($p < 0,05$). Hal ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh faktor kompetensi sumber daya manusia terhadap realisasi anggaran belanja. Artinya bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki peran penting terhadap tingkat realisasi penyerapan anggaran. Semakin kompeten pegawai atau sumber daya manusia maka semakin baik pula kinerjanya dalam merealisasikan anggaran, sehingga anggaran dapat terealisasi secara proporsional dan tujuan SKPD dapat dicapai.

Besarnya pengaruh faktor dokumen perencanaan dan faktor kompetensi sumber daya manusia terhadap realisasi anggaran belanja ditunjukkan dengan besarnya nilai koefisien regresi berganda R^2 sebesar 0,617. Artinya besarnya pengaruh faktor dokumen perencanaan dan faktor kompetensi sumber daya manusia terhadap realisasi anggaran belanja adalah sebesar 61,7%.

Sedangkan 38,3% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Seperti perubahan anggaran, perubahan jadwal program kegiatan dikarenakan belum tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kebanyakan SKPD mengalokasikan belanja modal yang berkaitan dengan infrastruktur di akhir triwulan 3 dan triwulan 4, sehingga waktu pelaksanaan pencairan dananya berdasarkan termin yang berakhir di akhir desember. Selain itu realisasi anggaran belanja yang menumpuk di akhir tahun terjadi karena program kegiatan yang dananya bersumber dari dana alokasi khusus belum dapat dilaksanakan karena harus menunggu juknis yang terlambat disahkan. Sehingga program kegiatan belum bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang disusun.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dimana penelitian tersebut dilakukan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Faktor dokumen perencanaan dan faktor kompetensi sumber daya manusia secara individu berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran belanja pada kantor Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu.
2. Faktor dokumen perencanaan dan faktor kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap realisasi anggaran belanja pada kantor Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kendala dan keterbatasan yang dapat dijadikan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini agar mendapatkan hasil lebih baik lagi.

Keterbatasan yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan instrumen kuesioner untuk menghimpun jawaban responden, sehingga menyebabkan respon yang bias dari kemungkinan responden tidak serius dalam menjawab pertanyaan kuesioner.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran belanja khususnya belanja modal, sehingga penelitian ini belum dapat mewakili persepsi realisasi anggaran belanja SKPD karena hanya berdasarkan sampel dengan tingkat kesalahan 5%.

3. Jumlah pegawai yang dijadikan responden sebanyak 67 orang terbatas hanya pada pegawai di Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu, sehingga data tersebut tidak bisa dibandingkan dengan SKPD di Kota Palu secara keseluruhan karena keterbatasan waktu.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini, maka diajukan saran-saran yang dapat memperbaiki penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, sebagai berikut.

1. Bagi kantor

Kendala yang berkaitan dengan kesulitan untuk merealisasikan anggaran belanja yang menumpuk di akhir tahun dapat diminimalisir dengan mengoptimalkan faktor dokumen perencanaan dengan tepat dan meningkatkan faktor kompetensi sumber daya manusia dengan mengikutsertakan pegawai dalam diklat atau kursus yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan daerah.

2. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Dalam mengisi kuesioner seharusnya responden menjawab secara serius sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga peneliti yakin bahwa data yang diberikan merupakan data yang benar dan dapat dipercaya.
- b. Penelitian ini hanya fokus pada realisasi anggaran belanja khususnya belanja modal, maka diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas lagi cakupannya seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- c. Keterbatasan pada penelitian ini hanya fokus pada satu SKPD dan jumlah sampel yang terbatas, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat dikembangkan pada keseluruhan SKPD dalam suatu pemerintah daerah untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Dan disarankan bagi peneliti selanjutnya agar menambah waktu penelitian sehingga data yang diperoleh dapat menyeluruh dan dapat melengkapi kekurangan yang ada pada penelitian ini.
- d. Penelitian ini hanya menguji dua faktor yaitu faktor dokumen perencanaan dan faktor kompetensi sumber daya manusia, maka disarankan untuk peneliti selanjutnya diharapkan menguji faktor-faktor lain seperti faktor administrasi, faktor uang persediaan dan faktor dokumen pengadaan barang dan jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Hasan. 2008. *Marketing*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Aloysia dan Yuliana. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 16 No.2, 135-146.
- Andrianto, Heri. 2008. *Pemrograman Mikrokontroler AVR ATmega16*. Bandung: Penerbit Informatika.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azhar, Susanto. 2007. *Sistem Informasi Akuntansi "Konsep dan Pengembangan Berbasis Komputer"*. Bandung: Lingga Jaya.
- Bastian, Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dahlan, Siamat. 2003. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Djarwanto, PS dan Pangestu Subagyo. 1994. *Statistik Induktif*. Yogyakarta: BPFE.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Hadari, Nawawi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Perss.
- Harryanto. 2008. *Perencanaan dan Penganggaran Daerah Pendekatan Kinerja*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mangkunegara, A. Anwar Prabu. 2006. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Munandar, M. 2001. *Budgeting, Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
- Nafarin, M. 2007. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.

- Nordiawan, Deddi dan Hertianti, Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Rumidi, Sukandar. 2002. *Penelitian Petunjuk Untuk Penelitian Pemula*. Yogyakarta: UGM Press.
- Rutoto, Sabar. 2007. *Pengantar Metodologi Penelitian*. FKIP: Universitas Muria Kudus.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Soekidjo, Notoatmodjo. 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sukoco, Badrir Munir. 2007. *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*. Jakarta: Erlangga.
- Suparno, Paul. 2005. *Miskonsepsi dan Perubahan Konsep dalam Pendidikan Fisika*. Yogyakarta: PT. Gramedia Widia Sarana.
- Supriyono, R.A. 1999. *Akuntansi Biaya Buku II: Perencanaan, Pengendalian, serta Pembuat Keputusan, Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Syamsi, Ibnu.1994. *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 2001. *Proyeksi Penduduk, Angkatan Kerja, Tenaga Kerja, dan Peran Serikat Pekerja dalam Peningkatan Kesejahteraan*. Majalah Perencanaan Pembangunan. Edisi 23.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan*.2004. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Usman, Husaini. 2011. *Manajemen : Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Yustika, Ahmad dan Erani. 2012. *Perekonomian Indonesia: Catatan Dari Luar Pagar*. Malang: Bayumedia Publishing.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata**BIODATA****Identitas diri**

Nama : Eko Saryanto
Tempat, Tanggal lahir : Klaten, 03 November 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Rumah : Perum. Taman Ria Estate III Kav. Ebony No. 25
Kota Palu, Sulawesi Tengah
Telepon Rumah/HP : 081354547168
Alamat *Email* : exosaryanto@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

- a. SDN 1 Mlese, Cawas, Klaten (1989-1995)
- b. SMPN 1 Cawas, Klaten (1995-1998)
- c. SMKN 1 Pedan, Klaten (1998-2001)
- d. DIII Akademi Sekretaris dan Manajemen Indonesia Surakarta (2001-2004)
- e. S1 Universitas Hasanuddin Makassar (STAR BPKP 2015-2017)

Pengalaman Kerja

- a. Kejaksaan Negeri Palu (2005-2006)
- b. Primagama Cabang Kota Palu (2006-2010)
- c. PDAM Kota Palu (2007 - 2010)
- d. Pemerintah Daerah Kota Palu (2010 - sekarang)

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, 10 Januari 2017

Eko Saryanto

Lampiran 2 Angket Faktor Dokumen Perencanaan, Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Realisasi Anggaran Belanja

KUESIONER PENELITIAN

Yth. Bapak/Ibu/Saudara

Responden

Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan bahwa saya adalah mahasiswa sarjana strata satu (S1) jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar yang sedang menyusun skripsi tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran belanja pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu. Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian ini.

Saya menyadari bahwa waktu Bapak/Ibu/Saudara sangat berharga dan terbatas. Partisipasi Bapak/Ibu/Saudara sekali akan sangat berguna demi perkembangan Ilmu Pengetahuan di Indonesia dan mudah-mudahan dapat memberikan rekomendasi dalam hal analisis faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran belanja yang lebih baik dimasa yang akan datang. Dan data dari Bapak/Ibu/Saudara akan dirahasiakan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kesediaannya kami mengucapkan terima kasih.

Peneliti,

Eko Saryanto

DAFTAR KUISIONER

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALU

Kami mohon partisipasi Bapak/Ibu/Saudara untuk menjawab sesuai kondisi yang sebenarnya. Data dan identitas Bapak/Ibu/Saudara akan kami rahasiakan.

A. Identitas Responden

Petunjuk A : Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai identitas bapak/ibu/saudara/saudari responden saat ini.

Nama :

Jabatan :

Jenis Kelamin : ☐ Laki-Laki ☐ Perempuan

Usia : ☐ Tahun

Pendidikan Terakhir : ☐ SMA ☐ D3

☐ S1 ☐ S2

Lama Bekerja : ☐ Tahun

B. Pertanyaan Pilihan

Petunjuk B :

Berilah tanda silang (x) atau (√) pada pilihan jawaban sesuai persepsi Saudara dan yang mencerminkan kondisi atau fakta yang sebenarnya berdasarkan keterangan seperti dibawah ini :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

KS : Kurang Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Pertanyaan :

Faktor – faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran belanja pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu.

No	Item Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
A.	Faktor Dokumen Perencanaan					
1	DPA yang disusun oleh SKPD sudah berdasarkan KUA-PPAS yang telah disetujui oleh DPRD dan Kepala Daerah					
2.	Dalam penyusunan anggaran SKPD tidak terjadi salah penentuan akun DPA SKPD					
3.	Apabila terjadi revisi DPA akan mengalami keterlambatan dalam penetapannya					
4.	Dalam penyusunan anggaran waktunya cukup sehingga data pendukung sudah disiapkan dengan baik					
5.	DPA SKPD dapat dipahami oleh pegawai					
6	Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun dalam DPA sudah sesuai dengan standar biaya pemerintah daerah					
7	DPA SKPD disahkan tepat waktu sesuai perencanaan SKPD					
8	Program kegiatan yang tertera pada DPA SKPD dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan					

B.	Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)	SS	S	KS	TS	STS
1.	Saya memahami DPA SKPD yang telah disahkan untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan SKPD					
2.	Saya memahami penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2006					
3.	Saya memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam penatausahaan keuangan					
4.	Saya terlibat dalam pengelola kegiatan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi					
5.	Adanya pejabat/pelaksana pengadaan barang dan jasa yang bersertifikat di SKPD					
6.	Adanya pelaksana dan pengelola kegiatan yang melaksanakan tugas lebih dari satu (rangkap tugas)					
7.	Adanya pejabat dan pegawai pengelola kegiatan yang sering mengalami mutasi antar SKPD					
8.	SKPD belum menerapkan mekanisme reward dan punishment terhadap pegawai					

C.	Realisasi Anggaran Belanja	SS	S	KS	TS	STS
1.	Tingkat Realisasi anggaran belanja pada triwulan tiga tidak mencapai 75%					
2.	Tingkat realisasi anggaran meningkat dari tahun ke tahun					
3.	Persentase realisasi anggaran pada SKPD pernah mendapat rapor merah					
4.	Realisasi anggaran digunakan sesuai dengan program kegiatan yang direncanakan					

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dapat menghubungi Eko Saryanto Kontak Person / HP. 081354547168. Atau jawaban dapat pula dikirim ke email exosaryanto@gmail.com. Atas partisipasi dan waktunya kami ucapkan terima kasih.

Lampiran 3 Skor Hasil Angket Faktor Dokumen Perencanaan, Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Realisasi Anggaran Belanja

R	Faktor Dokumen Perencanaan									Faktor Kompetensi SDM									Realisasi Anggaran Belanja				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	TS	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	TS	Q1	Q2	Q3	Q4	TS
1	4	4	5	3	4	4	4	4	32	4	4	5	4	4	3	3	3	30	4	4	4	5	17
2	4	4	4	4	3	3	3	4	29	4	4	3	4	4	4	3	4	30	4	4	4	3	15
3	4	4	4	3	3	4	4	4	30	4	4	4	4	5	4	4	5	34	4	3	4	5	16
4	5	4	4	3	5	3	3	3	30	4	3	3	4	2	4	4	4	28	4	4	4	4	16
5	5	4	4	3	3	3	3	3	28	4	3	3	4	3	4	4	4	29	4	4	4	4	16
6	4	4	3	4	4	4	4	4	31	5	4	4	4	4	3	3	4	31	3	4	3	3	13
7	5	4	3	4	4	5	4	4	33	5	4	4	4	5	3	3	4	32	5	5	5	4	19
8	5	4	5	4	4	4	4	4	34	4	4	5	4	4	4	4	4	33	5	4	5	5	19
9	5	4	5	4	4	5	4	5	36	5	4	5	4	4	4	4	4	34	4	5	5	5	19
10	5	5	3	4	4	5	5	5	36	5	4	4	4	5	3	3	2	30	4	4	4	4	16
11	4	4	4	5	4	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	5	4	33	2	3	4	3	12
12	5	5	5	5	5	5	5	5	40	4	4	4	4	5	4	3	5	33	3	3	3	3	12
13	4	4	4	5	4	4	4	4	33	4	5	3	4	4	4	3	5	32	4	4	4	2	14
14	5	4	4	5	4	4	4	4	34	4	4	4	4	4	4	5	4	33	4	2	3	3	12
15	4	4	4	4	3	3	3	4	29	4	4	3	4	4	4	3	5	31	4	4	4	4	16
16	4	4	4	2	3	4	3	4	28	4	4	4	4	5	4	4	3	32	4	5	5	5	19
17	4	5	3	5	5	5	5	5	37	5	3	3	4	5	3	3	5	31	3	3	4	2	12
18	5	5	5	5	4	5	4	4	37	4	5	5	5	5	4	4	5	37	5	3	3	3	14
19	4	5	4	5	4	5	4	5	36	4	5	4	5	4	5	4	5	36	4	4	4	4	16
20	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	3	3	4	4	3	3	5	29	3	3	3	3	12

21	4	4	3	4	4	3	4	4	30	4	4	3	4	4	2	2	4	27	4	4	4	4	16
22	5	4	2	4	5	5	5	5	35	5	4	4	2	4	2	2	2	25	3	3	5	2	13
23	5	4	4	5	4	4	4	4	34	5	4	4	4	4	3	2	4	30	4	5	4	3	16
24	5	4	3	4	4	4	4	3	31	4	3	3	4	4	3	3	4	28	3	3	3	3	12
25	4	4	2	4	4	4	4	4	30	5	4	4	4	3	4	4	4	32	5	4	5	4	18
26	4	4	4	4	4	4	5	4	33	5	4	4	4	4	4	3	5	33	4	4	4	5	17
27	4	4	5	4	5	4	4	4	34	4	4	4	4	4	3	3	3	29	4	4	4	3	15
28	5	3	4	4	4	4	4	4	32	5	4	4	4	4	4	3	4	32	4	3	4	5	16
29	4	4	3	4	4	4	4	4	31	4	4	4	4	4	3	3	4	30	4	4	4	4	16
30	5	5	3	4	4	4	5	5	35	5	4	3	4	5	5	4	4	34	4	4	4	4	16
31	5	5	4	5	5	5	4	3	36	5	4	4	5	3	3	4	4	32	3	4	3	3	13
32	5	4	4	3	5	4	3	3	31	4	4	3	4	3	4	3	3	28	5	5	5	4	19
33	4	4	3	4	4	4	4	4	31	4	4	3	4	4	4	3	4	30	5	4	5	5	19
34	4	4	5	5	4	4	5	4	35	5	4	4	4	5	3	3	4	32	4	5	5	5	19
35	4	4	3	4	4	4	4	3	30	4	4	3	4	4	4	3	4	30	4	4	4	4	16
36	4	5	4	5	4	5	4	5	36	4	5	4	4	4	3	5	4	33	2	3	4	3	12
37	4	3	4	5	4	4	5	4	33	4	4	3	4	4	4	4	4	31	3	3	3	3	12
38	3	4	1	2	3	2	3	4	22	5	4	5	4	5	4	3	4	34	4	4	4	2	14
39	4	4	3	2	3	2	3	4	25	5	5	4	4	4	4	5	4	35	4	2	3	5	14
40	3	4	5	5	4	3	4	2	30	3	3	5	3	4	3	4	3	28	4	4	4	4	16
41	5	4	4	4	4	5	5	4	35	4	5	4	5	5	4	5	4	36	4	5	5	4	18
42	4	4	5	4	5	4	4	4	34	4	4	4	5	5	4	4	5	35	3	3	4	3	13
43	5	4	4	5	4	3	4	4	33	5	5	4	4	5	4	3	4	34	5	3	3	3	14
44	4	4	3	5	4	4	4	3	31	4	4	4	2	5	3	4	2	28	4	4	4	4	16
45	3	4	3	4	5	3	4	4	30	4	3	5	5	5	5	3	5	35	3	3	3	3	12

46	4	4	5	5	4	5	4	5	36	4	4	4	5	5	4	4	5	35	4	4	4	4	16
47	4	4	2	3	4	4	4	4	29	5	5	5	5	4	5	4	5	38	3	3	5	2	13
48	5	4	3	5	4	5	4	5	35	4	4	4	5	4	4	4	5	34	4	5	4	4	17
49	4	4	5	4	4	5	3	4	33	3	4	4	2	2	3	2	2	22	3	3	3	3	12
50	5	4	4	4	4	3	5	3	32	4	5	3	5	4	4	4	4	33	5	4	5	4	18
51	2	4	3	5	4	4	4	3	29	5	4	5	4	3	4	3	5	33	5	4	5	4	18
52	4	4	3	4	4	4	5	3	31	4	4	3	4	3	4	5	4	31	4	5	5	5	19
53	5	4	5	4	5	5	5	5	38	5	5	5	5	5	4	4	4	37	4	4	4	4	16
54	5	4	4	4	5	4	5	4	35	4	5	4	4	3	5	3	4	32	2	3	4	3	12
55	4	3	5	2	3	3	4	4	28	3	3	3	2	4	3	4	2	24	3	3	3	3	12
56	4	3	2	4	4	3	3	3	26	4	4	5	5	5	4	3	4	34	4	4	4	2	14
57	3	5	4	4	4	5	4	4	33	5	4	4	4	5	5	5	4	36	4	2	3	3	12
58	4	4	4	5	4	5	4	3	33	4	5	5	5	5	4	4	5	37	4	4	4	4	16
59	3	3	4	4	4	5	3	4	30	5	5	5	4	5	5	5	5	39	4	5	5	4	18
60	5	5	5	5	3	4	4	4	35	5	5	5	5	4	5	4	5	38	3	3	4	2	12
61	3	4	4	4	5	3	4	4	31	4	5	4	4	4	5	5	5	36	5	3	3	3	14
62	3	3	4	3	3	3	3	3	25	5	4	4	4	4	5	5	5	36	4	4	4	4	16
63	3	3	4	3	3	2	3	3	24	4	4	4	4	4	4	3	4	31	3	3	3	3	12
64	3	3	3	4	3	2	5	4	27	4	4	4	4	4	4	3	4	31	4	4	4	4	16
65	4	5	4	5	3	3	4	5	33	4	5	4	3	5	3	4	3	31	4	3	3	4	14
66	5	5	4	3	4	5	5	5	36	3	3	4	5	4	4	5	3	31	3	4	3	4	14
67	5	5	5	3	4	3	3	4	32	5	5	4	4	4	5	4	5	36	5	4	4	4	17

Lampiran 4 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Faktor Dokumen Perencanaan

Correlations									
	Dok.Prcn_1	Dok.Prcn_2	Dok.Prcn_3	Dok.Prcn_4	Dok.Prcn_5	Dok.Prcn_6	Dok.Prcn_7	Dok.Prcn_8	Total_Skor
Dok. Pearson Correlation	1	.333**	.199	.083	.244*	.355**	.244*	.262*	.564**
Prcn Sig. (2-tailed)		.006	.106	.503	.047	.003	.046	.032	.000
_1 N	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Dok. Pearson Correlation	.333**	1	.118	.282*	.224	.415**	.242*	.405**	.598**
Prcn Sig. (2-tailed)	.006		.340	.021	.069	.000	.048	.001	.000
_2 N	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Dok. Pearson Correlation	.199	.118	1	.170	.076	.196	.005	.059	.437**
Prcn Sig. (2-tailed)	.106	.340		.169	.541	.111	.969	.636	.000
_3 N	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Dok. Pearson Correlation	.083	.282*	.170	1	.323**	.439**	.406**	.135	.619**
Prcn Sig. (2-tailed)	.503	.021	.169		.008	.000	.001	.276	.000
_4 N	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Dok. Pearson Correlation	.244*	.224	.076	.323**	1	.452**	.372**	.106	.565**
Prcn Sig. (2-tailed)	.047	.069	.541	.008		.000	.002	.391	.000
_5 N	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Dok. Pearson Correlation	.355**	.415**	.196	.439**	.452**	1	.397**	.429**	.787**
Prcn Sig. (2-tailed)	.003	.000	.111	.000	.000		.001	.000	.000
_6 N	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Dok. Pearson Correlation	.244*	.242*	.005	.406**	.372**	.397**	1	.369**	.616**

Prcn	Sig. (2-tailed)	.046	.048	.969	.001	.002	.001		.002	.000
_7	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Dok.	Pearson Correlation	.262*	.405**	.059	.135	.106	.429**	.369**	1	.560**
Prcn	Sig. (2-tailed)	.032	.001	.636	.276	.391	.000	.002		.000
_8	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Total	Pearson Correlation	.564**	.598**	.437**	.619**	.565**	.787**	.616**	.560**	1
_Sko	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
r	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.740	8

Lampiran 5 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia

Correlations									
	Komp.SDM_1	Komp.SDM_2	Komp.SDM_3	Komp.SDM_4	Komp.SDM_5	Komp.SDM_6	Komp.SDM_7	Komp.SDM_8	Total_Skor
Komp. Pearson Correlation	1	.281*	.226	.168	.205	.154	-.058	.271*	.437**
SDM_ Sig. (2-tailed)		.021	.066	.174	.096	.214	.641	.026	.000
1 N	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Komp. Pearson Correlation	.281*	1	.301*	.259*	.192	.347**	.233	.246*	.584**
SDM_ Sig. (2-tailed)	.021		.013	.034	.120	.004	.057	.044	.000
2 N	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Komp. Pearson Correlation	.226	.301*	1	.228	.288*	.197	.132	.109	.511**
SDM_ Sig. (2-tailed)	.066	.013		.064	.018	.109	.289	.381	.000
3 N	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Komp. Pearson Correlation	.168	.259*	.228	1	.212	.467**	.254*	.651**	.707**
SDM_ Sig. (2-tailed)	.174	.034	.064		.085	.000	.038	.000	.000
4 N	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Komp. Pearson Correlation	.205	.192	.288*	.212	1	.051	.099	.155	.466**
SDM_ Sig. (2-tailed)	.096	.120	.018	.085		.680	.427	.211	.000
5 N	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Komp. Pearson Correlation	.154	.347**	.197	.467**	.051	1	.477**	.553**	.714**
SDM_ Sig. (2-tailed)	.214	.004	.109	.000	.680		.000	.000	.000
6 N	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Komp. Pearson Correlation	-.058	.233	.132	.254*	.099	.477**	1	.181	.531**

SDM_7	Sig. (2-tailed) N	.641 67	.057 67	.289 67	.038 67	.427 67	.000 67	.143 67	.000 67
Komp.8	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.271* .026 67	.246* .044 67	.109 .381 67	.651** .000 67	.155 .211 67	.553** .000 67	.181 .143 67	1 .702** 67
Total_Skor	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.437** .000 67	.584** .000 67	.511** .000 67	.707** .000 67	.466** .000 67	.714** .000 67	.531** .000 67	1 .702** 67

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.723	8

Lampiran 6 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Realisasi Anggaran Belanja

		Correlations				
		RAB_1	RAB_2	RAB_3	RAB_4	Total_Skor
RAB_1	Pearson Correlation	1	.394**	.358**	.454**	.721**
	Sig. (2-tailed)		.001	.003	.000	.000
	N	67	67	67	67	67
RAB_2	Pearson Correlation	.394**	1	.646**	.429**	.803**
	Sig. (2-tailed)	.001		.000	.000	.000
	N	67	67	67	67	67
RAB_3	Pearson Correlation	.358**	.646**	1	.361**	.756**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000		.003	.000
	N	67	67	67	67	67
RAB_4	Pearson Correlation	.454**	.429**	.361**	1	.764**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.003		.000
	N	67	67	67	67	67
Total_Skor	Pearson Correlation	.721**	.803**	.756**	.764**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	67	67	67	67	67

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.759	4

Lampiran 7 Hasil Regresi Linear Berganda, Koefesien Determinasi (R^2), Uji F, dan Uji t

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Komp.SDM, Dok.Prcn ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: RAB

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.793 ^a	.629	.617	2.668

a. Predictors: (Constant), Komp.SDM, Dok.Prcn

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	771.298	2	385.649	54.188	.000 ^b
	Residual	455.478	64	7.117		
	Total	1226.776	66			

a. Dependent Variable: RAB

b. Predictors: (Constant), Komp.SDM, Dok.Prcn

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.216	1.208		1.834	.071
	Dok.Prcn	.206	.055	.430	3.733	.000
	Komp.SDM	.199	.055	.418	3.624	.001

a. Dependent Variable: RAB